



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2019

BUKU II

DAFTAR ISI

1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1
1.1	Urusan Pendidikan	1
1.2	Urusan Kesehatan	5
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	7
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	11
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16
1.6	Urusan Sosial	19
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	20
2.1	Urusan Ketenagakerjaan	20
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
2.3	Urusan Ketahanan Pangan	22
2.4	Pertanahan	23
2.5	Lingkungan Hidup.....	24
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29
2.9	Perhubungan	31
2.10	Komunikasi dan Informatika	33
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	34
2.12	Penanaman Modal.....	35
2.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	37
2.14	Statistik	38
2.15	Persandian	39
2.16	Kebudayaan	39
2.17	Perpustakaan	41
2.18	Kearsipan	41
3	Urusan Pilihan.....	42
3.1	Kelautan dan Perikanan	42
3.2	Pariwisata	43
3.3	Pertanian	44
3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral.....	45
3.5	Perdagangan	46
3.6	Perindustrian	47
3.7	Transmigrasi	48
4	Urusan Penunjang.....	48
4.1	Fungsi Lain-lain	48
4.2	Keuangan	49
4.3	Perencanaan Pembangunan	52
4.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	53
4.5	Penelitian dan Pengembangan.....	54
4.6	Pengawasan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan teknologi informasi	3
Gambar 1-2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Magelang tahun 2019	8
Gambar 1-3 Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Pekerjaan Konstruksi 2019	8
Gambar 1-4 Jalur Pedestrian di Kota Magelang	10
Gambar 1-5 Sarana Air Bersih	13
Gambar 2-1 Sektor Pengurangan Sampah	25
Gambar 2-2 Kinerja Indikator Penanganan Sampah yang Tertangani	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019	1
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019	5
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019	7
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	11
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019	16
Tabel 1.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019	19
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019	20
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019	21
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2019	22
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019	24
Tabel 2.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019	24
Tabel 2.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019	28
Tabel 2.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019	29
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019	29
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019	31
Tabel 2.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019	33
Tabel 2.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019	34
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019	35
Tabel 2.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019	37
Tabel 2.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019	38
Tabel 2.15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019	39
Tabel 2.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019	39
Tabel 2.17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019	41
Tabel 2.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019	41
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	42
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019	43
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019	44
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019	45
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019	46
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019	47

Tabel 3.7 Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Tahun 2019	48
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi Lain Tahun 2019	48
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program pada Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2019	49
Tabel 4.3 Perkembangan Modal Disetor dan Bagian Laba BUMD	50
Tabel 4.4 Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2015-2019	50
Tabel 4.5 Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2015-2019	51
Tabel 4.6 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2019	51
Tabel 4.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019	52
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019.....	53
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019.....	54
Tabel 4.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2019	54
Tabel 4.11 Capaian Indikator Kinerja Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP Tahun 2018- 2019.....	55

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Pada Bagian ini disajikan sesuai Permendagri 86 tahun 2017 target dan realisasi indikator kinerja, dengan keterangan status capaian sebagai berikut:

- ST : Sangat Tinggi (90% < Kinerja RKPD Th. 2019)
- T : Tinggi (75% < Kinerja RKPD Th. 2019 ≤ 90%)
- S : Sedang (65% < Kinerja RKPD Th. 2019 ≤ 75%)
- R : Rendah (50% < Kinerja RKPD Th. 2019 ≤ 65%)
- SR : Sangat Rendah (Kinerja RKPD Th. 2019 ≤ 50%)

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1 Urusan Pendidikan

Kinerja urusan Pendidikan diukur melalui 45 indikator, dengan capaian terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD* (Tujuan 4)	69%	67%	95.46%	142.47%	ST	138.34%	ST	Disdikbud
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi* (Tujuan 4)	56%	54%	52.11%	96.5%	ST	96.5%	ST	Disdikbud
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI/Paket A* (Tujuan 1)	100%	100%	109.18%	109.18%	ST	91.74%	ST	Disdikbud
		APK SD/SDLB/MI/Paket A* (Tujuan 4)	120%	116%	133.21%	100.91%	ST	100.91%	ST	Disdikbud
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B* (Tujuan 1)	84%	80%	136.92%	111.31%	ST	111.31%	ST	Disdikbud
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B* (Tujuan 4)	100%	90%	176.09%	105.44%	ST	105.44%	ST	Disdikbud
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	1:136	1:151	111.02%	ST	111.02%	ST	Disdikbud
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 13-15	1:290	1:290	1:309	106.55%	ST	106.55%	ST	Disdikbud
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16	1:16	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	1:14	1:14.5	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,0001	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0,04	0,0016	-	ST	-	ST	Disdikbud
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,001	0,002	0,0005	-	ST	-	ST	Disdikbud
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	150%	135.90%	90.60%	ST	90.6%	ST	Disdikbud
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	165%	160%	106.30%	66.43%	S	66.43%	S	Disdikbud
		Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	70%	100%	142.85%	ST	142.85%	ST	Disdikbud
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar	24 pelajar	36 pelajar	47 pelajar	76,6%	T	76.6%	T	Disdikbud
Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	1	1	100%	ST	100%	ST	Disdikbud		
Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	100%	90%	100%	111,11%	ST	111.11%	ST	Disdikbud		

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	90%	100%	111,11%	ST	111.11%	ST	Disdikbud
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design* (Tujuan 4)	60%	40%	60%	150%	ST	150%	ST	Disdikbud
3	Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun* (Tujuan 4)	97,95%	97,31%	98,68%	101,74%	ST	101,74%	ST	Disdikbud
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30%	20,00%	28,75%	143,75%	ST	143,75	ST	Disdikbud
		Jumlah Juara FASI	-	0	7	700%	ST			Disdikbud
		Jumlah Juara MTQ	2	2	2	100%	ST			Disdikbud
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36,25%	35,75%	80,93%	226,37%	ST	223,25%	ST	Disdikbud
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,53%	14,23%	45,42%	319,18%	ST	312,59%	ST	Disdikbud
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	86%	94,78%	110,21%	ST	107,70%	ST	Disdikbud
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	55,15%	54,15%	44,32%	81,84%	T	80,36%	T	Disdikbud
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,40%	95,20%	96,09%	100,93%	ST	100,72%	ST	Disdikbud
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik* (Tujuan 4)	68,67%	67,97%	67,61%	99,47%	ST	98,45%	ST	Disdikbud
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	80%	70%	87,34%	124,77%	ST	109,84%	ST	Disdikbud
		Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	70%	100%	142,85%	ST	125%	ST	Disdikbud
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	2,000	2,235	111,75%	ST	111,75%	ST	Disdikbud
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	100%	90%	100%	111,11%	ST	100%	ST	Disdikbud
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional	52	48	23					
		Provinsi	34 pelajar	32 pelajar	21	65,62%	S	61,76%	S	Disdikbud
		Nasional	18 pelajar	16 pelajar	2	12,5%	SR	11,11%	SR	Disdikbud
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B* (Tujuan 4)	97%	92%	96,15%	104,51%	ST	99,12%	ST	Disdikbud
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B* (Tujuan 4)	100%	98%	100%	102,04%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	90%	60%	100%	166,6%	ST	111,11%	ST	Disdikbud
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi* (Tujuan 4)	85%	50%	100%	200%	ST	117,64%	ST	Disdikbud
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	100%	74,65%	74,65%	S	74,65%	S	Disdikbud
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan <i>spiritual teaching</i>	60%	50%	65,17%	130,34%	ST	108,61%	ST	Disdikbud

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mengukur Indikator Kinerja Urusan Pendidikan terdapat 45 indikator kinerja, adapun realisasinya 42 indikator capaiannya tinggi dan sangat tinggi, 2 indikator capaiannya sedang, dan 1 indikator capaiannya sangat rendah yaitu Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Nasional.

Dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan, terdapat 4 indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 ≥ 150% target RPJMD), yaitu:

1. Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik, faktor pendorongnya adalah:

a. Peningkatan kualifikasi S 1/D4 Guru PAUD

Guru PAUD di Kota Magelang sebagian besar sudah menempuh pendidikan jenjang S 1 / D4, jumlah total Guru PAUD di Kota Magelang sebanyak 262 orang dan yang sudah menempuh pendidikan jenjang S 1/D4 sebanyak 212 atau 86%.

b. Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD

Semua Guru PAUD mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik Diklat Dasar maupun Diklat berjenjang, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan mempersiapkan pendidik untuk lebih profesional.

2. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, faktor pendorongnya adalah adanya penekanan dari pemerintah pusat maupun daerah kalau semua Guru atau pendidik harus mempunyai ijazah Sarjana yang linear;
3. Persentase Sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs, faktor pendorongnya adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa sarana prasarana yang memadai di semua Sekolah Menengah Pertama sehingga semua sekolah di Kota Magelang sudah melaksanakan CBT;
4. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, faktor pendorongnya adalah adanya dukungan sarana prasarana yang memadai dari Pemerintah Daerah di semua sekolah di Kota Magelang.



*Gambar 1-1
Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan teknologi informasi*

Disisi lain terdapat satu indikator yang masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu:

1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional
 Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Provinsi dan Nasional dari Target 32 di jenjang Provinsi baru tercapai 21 dan di jenjang Nasional dari target 16 hanya tercapai 2 hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Target ditentukan masih mengikutsertakan capaian prestasi pada sekolah SMA/SMK, sedangkan mulai tahun 2017 Kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Kurangnya pembimbingan/pendampingan dari tenaga Ahli/Profesional dari kalangan akademisi Perguruan Tinggi untuk Lomba MAPSI, Lomba Olimpiade Sains Nasional untuk Cabang Matematika, IPA dan IPS;
 - c. Kompetisi perseorangan yang sangat ketat untuk Lomba di Tingkat Provinsi dan Nasional.

Selain hal tersebut diatas terdapat 6 indikator capaian kinerja belum tercapai tetapi optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi
 Persentase Lembaga PAUD Yang Terakreditasi (Target 54%, Realisasi 52,11%), target tidak tercapai di akhir tahun 2019 disebabkan terbatasnya jumlah kuota lembaga PAUD yang diakreditasi dari Badan Akreditasi Provinsi yang hanya 5 – 6 lembaga. Sehingga berpengaruh pada pembilang Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi di Kota Magelang berjumlah 94 lembaga. Dilihat dari perhitungan untuk mencapai target akhir RPJMD 2021 sebesar 56% (100 lembaga PAUD) Kota Magelang masih kurang 6 lembaga yang harus terakreditasi. Dari data tersebut optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

2. Angka melanjutkan SD ke SMP

Angka Melanjutkan SD ke SMP (Target 150%, Realisasi 135,90%), target tidak tercapai kurang 14,1% disebabkan oleh adanya sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru, sebagian lulusan SD/MI yang berdomisili dari luar Kota Magelang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP/MTs di Kota Magelang, namun demikian dapat dipastikan bahwa seluruh lulusan SD/MI di Kota Magelang semuanya dapat tertampung di jenjang SMP/MTs. Dari data jumlah lulusan SD/MI di Kota Magelang sebanyak 2.432 siswa dan daya tampung SMP/MTs sebanyak 3.305 siswa sehingga dipastikan di Kota Magelang tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di jenjang SMP/MTs.

3. Angka melanjutkan SMP ke SMA

Angka Melanjutkan SMP ke SMA (Target 160%, Realisasi 106,30%), target tidak tercapai disebabkan karena lulusan SMP melanjutkan sekolah ke Sekolah Kejuruan/SMK. Namun demikian karena adanya sistem Zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian siswa lulusan SMP/MTs yang berdomisili dari luar Kota tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA di Kota Magelang. Dari data jumlah lulusan SMP/MTs di Kota Magelang sebanyak 3442 siswa dan daya tampung SMA/SMK sebanyak 3659 siswa sehingga dipastikan di Kota Magelang tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di jenjang SMA/SMK.

4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik

Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik (Target 54,15%, Realisasi 44,32%), target tidak tercapai masih kurang 9,83%. Dari data Guru SD/MI yang berjumlah 862 baru 382 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik banyak yang pensiun.

Untuk memenuhi target RPJMD 2021 yaitu 55,15% atau sebanyak 475 guru SD maka harus ada penambahan sebanyak 95 guru, untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendampingan pendidikan profesi Guru (PPG) bagi Guru SD yang belum bersertifikasi pendidik agar semakin banyak guru SD yang mendapat Sertifikat Pendidik. Data tahun ini Guru SD yang mengikuti PPG sebanyak 50 orang sehingga untuk 2 tahun kedepan (akhir RPJMD) optimis target bisa tercapai.

5. Persentase Guru SMP bersertifikat Pendidik

Persentase Guru SMP yang bersertifikat Pendidik (Target 67,97%, Realisasi 67,61%), target tidak tercapai masih kurang 0,86%. Dari data Guru SMP yang berjumlah 639 baru 432 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan adanya Guru SMP yang bersertifikat pendidik pensiun.

Untuk memenuhi target RPJMD yaitu 68,67% atau sebanyak 438 guru, masih ada kekurangan 6 guru untuk mencapai target akhir RPJMD 2021. Dari data tersebut optimis target dapat tercapai.

6. Persentase Pembina Pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar

Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar (Target 100%, Realisasi 74,65%), target tidak tercapai disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan kursus mahir dasar pada Tahun 2019. Dari Jumlah Guru Pembina PRAMUKA 1.440 yang sudah mengikuti kursus Mahir Dasar berjumlah 1.075. Adapun kursus mahir dasar pramuka bagi pembinaan pramuka diselenggarakan di beberapa sekolah melalui fasilitasi anggaran BOSDA.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras dan melakukan pembaharuan/inovasi dalam bidang pendidikan. Di Kota Magelang inovasi dalam pendidikan yang dilakukan antara lain GPS (Gerakan Peduli Siswa), JBM (Jam Belajar Masyarakat) dan Gelis Suci (Gerakan Literasi Membaca Kitab Suci).

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

1. Belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Standar Sarana Prasarana (Sarpras);
2. Belum meratanya persebaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Magelang;
3. Belum tersedianya Satuan Pendidikan Non Formal Negeri (Sanggar Kegiatan Belajar/ SKB) di Kota Magelang;
4. Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
5. Kurang memadainya sarana prasarana dan tenaga pendidikan pada pendidikan non formal.
6. Belum efektifnya pendidikan karakter dan nasionalisme di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

1.2 Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan melibatkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
		Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	<20%	2,38%	108.04%	ST	108.04%	ST	Dinkes
		Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	<45%	0,71%	4.498,4%	ST	4.498,4%	ST	Dinkes
		Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15%	<15,4%	0,15%	1.539%	ST	1.499%	ST	Dinkes
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	75%	72%	100%	138,89%	ST	133%	ST	Dinkes
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	98%	98%	99.15%	101,17%	ST	101,17%	ST	Dinkes
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0,31%	<0,31	0,19%	138.7%	ST	138.7%	ST	Dinkes
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	86,1%	84,8%	86.30%	101,76%	ST	100.23%	ST	Dinkes
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	100%	100	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100%	100	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
		Angka Kesakitan DBD	<50	<50	58,33	83,34%	T	83,34%	T	Dinkes
		Angka Prevalensi Kasus (<i>Case Notification Rate = CNR</i>) TB	<101	<103	174.23	59,11%	R	57.97%	R	Dinkes
		Angka Penemuan Kasus (<i>Case Detection Rate = CDR</i>) TB	90	90	88.49%	98,32%	ST	1%	ST	Dinkes
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,5%	<0,5%	0,01%	198%	ST	198%	ST	Dinkes
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100%	87,5%	100%	114,28%	ST	100%	ST	Dinkes
		Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	92.5%	80%	100%	125%	ST	108%	ST	Dinkes
		Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	100%	80%	100%	125%	ST	100%	ST	Dinkes
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	80%	100%	100%	100%	ST	125%	ST	Dinkes
		Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	100%	100%	100%	125%	ST	100%	ST	Dinkes
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	80%	100%	125%	ST	111%	ST	Dinkes
		Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	79,12%	79,12%	ST	79,12%	ST	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	15%	25.03%	166,6%	ST	166,6%	ST	Dinkes
		Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	50%	30%	86.96%	290%	ST	174%	ST	Dinkes
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	76,47%	64,71%	64.71%	100%	ST	85%	ST	Dinkes
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	85%	100%	117,65%	ST	117,65%	ST	Dinkes
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%	96%	96.54%	100,56%	ST	100,56%	ST	Dinkes

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	90%	95.17%	105,74%	ST	106%	ST	Dinkes
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	35,29%	24%	100%	416,67%	ST	283%	ST	Dinkes
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%	80%	75,92%	96%	ST	96%	ST	Dinkes
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	35,29%	24%	100%	416,67%	ST	283%	ST	Dinkes
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	90%	88%	91.23%	104%	S	101%	S	Dinkes
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	95%	96,24%	101,31%	ST	101%	ST	Dinkes
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinkes
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95%	92%	100%	108,70%	ST	105%	ST	Dinkes
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	99,87%	99,87%	ST	100%	ST	Dinkes
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	AA	A		S		S	Dinkes

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2020

Dari ke-41 indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat 37 indikator capaiannya sangat tinggi dan 1 (satu) tinggi, 2 indikator dengan capaian sedang dan 1 indikator dengan capaian rendah. Indikator yang rendah tersebut adalah Angka Prevalensi Kasus (*Case Notification Rate = CNR*) TB.

Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, terdapat indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu:

1. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin
Indikator ini telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan RPJMD, faktor pendorongnya adalah dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga kebutuhan masyarakat miskin akan layanan kesehatan bisa terpenuhi. Hal ini ditandai dengan Kota Magelang yang telah mencapai nilai *Universal Health Coverage* 97,35%.
2. Cakupan Puskesmas Ramah Anak
Indikator ini telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan RPJMD, hal ini dikarenakan komitmen Kota Magelang yang tinggi terhadap perlindungan anak dan perempuan. Pemkot Magelang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak sampai dengan dukungan anggaran serta berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan anak. Selain itu, juga menyediakan segala fasilitas publik yang ramah anak termasuk puskesmas. Kota Magelang yang memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Nindya pada tahun 2019 yang merupakan penghargaan kelima yang diperoleh Kota Magelang.
3. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia
Indikator ini telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan RPJMD, hal ini dikarenakan oleh komitmen pemerintah kota Magelang sebagai kota inklusif khususnya terhadap para lansia dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai bagi kaum lansia.

Di sisi lain terdapat satu indikator yang masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu Angka Prevalensi Kasus (*Case Notification Rate = CNR*) TB. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah rendahnya pengetahuan akan bahaya TB yang sangat mudah menular dan tidak segera diadakan pengobatan meskipun sudah ada gejala TB. Selain itu banyak penderita TB yang tidak menyelesaikan masa pengobatan selama 6 bulan, sehingga suatu saat mereka akan sakit lagi. Hal lain yang menyebabkan tingginya prevalensi TB adalah banyaknya penduduk luar Kota Magelang yang ditemukan dan berobat sehingga ikut terdata.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, hampir semua indikator urusan ini sudah memiliki status capaian ST. Meski demikian masih ada indikator dengan kategori R yaitu Angka Prevalensi Kasus (*Case Notification Rate = CNR*) TB, perlu upaya keras agar indikator ini dapat memenuhi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan kondisi ini diharapkan terus terjaga sehingga target tersebut dapat tercapai sampai dengan akhir RPJMD.

1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan indikator yang terbagi ke beberapa program sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s/d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	33 %	26%	25.48%	98.00%	ST	77.21%	T	DPUPR
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB	40%	35%	223.21%	637.76%	ST	558.03%	ST	DPUPR
3	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDRTRK, dan RTBL)	100%	100%	8.33%	8.33%	SR	8.33%	SR	DPUPR
		Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	100%	100%	100.00%	ST	100.00%	ST	DPUPR
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%	100.00%	ST	100.00%	ST	DPUPR
4	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	2,242 meter	1,742 meter	2,055 meter	117.97%	ST	91.66%	ST	DPUPR
		Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	71,89%	66.65%	74.83%	112.27%	ST	104.09%	ST	DPUPR
5	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	89%	86.00%	87.94%	102.26%	ST	98.81%	ST	DPUPR
		Jumlah shipon yang dibangun	10 bh	7 bh	9 bh	128.57%	ST	90.00%	T	DPUPR
6	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	80%	76%	65.10%	85.66%	T	81.38%	T	DPUPR
7.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100%	90.00%	81%	90.00%	T	81.00%	T	DPUPR
8	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	100%	100%	100%	100.00%	ST	100.00%	ST	DPUPR
9	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai dan sumber daya air dalam keadaan baik	100%	100%	80%	80.00%	T	80.00%	T	DPUPR
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	100%	97%	89.47%	92.24%	ST	89.47%	T	DPUPR
11	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	96%	94%	94.59%	100.63%	ST	98.53%	ST	DPUPR
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	92%	94%	102.17%	ST	98.95%	ST	DPUPR
12	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	Persentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	100%	100.00%	ST	100.00%	ST	DPUPR
		Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	100%	80%	43,78%	54.72%	R	43.78%	SR	DPUPR
13	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	25%	100.00%	400.00%	ST	400.00%	ST	DPUPR
14	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau								DLH
		Privat	10	10	19,1	191 %	ST	100 %	ST	
		Publik	18,50	18,44	16	86,77 %	T	86.49	T	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2020

Gambaran Umum Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sampai dengan Tahun 2019, dibandingkan dengan target tahunan, dari 21 (dua puluh satu) indikator, 15 (lima belas) indikator yang berkinerja sangat tinggi, 4 (empat) indikator tinggi, 1 (satu) indikator rendah, dan 1 (satu) indikator sangat rendah.

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat indikator yang kerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target 2019 RPJMD), yaitu:

1. Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB (637,76%)

Gambaran capaian target adalah jumlah surat teguran terkirim di akhir tahun 2019 sebanyak 375 unit bangunan, jumlah tersebut meningkat, akibat adanya penyederhana mekanisme pengawasan di lapangan dengan adanya efektifitas kinerja dari tim dengan adanya inovasi blangko surat teguran yang berada pada petugas/anggota tim di setiap kelurahan, sehingga cepat memberikan teguran, agar pemilik objek dapat memproses perizinan lebih lanjut.



Rapat Bulanan TIM WASMANRU



Contoh Surat Teguran



Pemasangan Papan Peringatan

Gambar 1-2
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Magelang tahun 2019

2. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi (K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien) (400%)

Pekerjaan pada urusan pekerjaan umum dengan jumlah paket konstruksi yang mencapai 33 paket, kesemuanya sudah memenuhi asas dan prosedur secara kualitas, adapun target hanya 25% dari paket yang dikerjakan, faktor pendorongnya berupa sudah adanya kerjasama dalam pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam pelaksanaan pekerjaan di Lapangan, dan juga melibatkan tim perencanaan dari praktisi dari Universitas dalam hal ini UGM untuk penjaminan bahan-bahan dan struktur yang berkualitas. Sejumlah upaya juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang sebagai upaya awal untuk mendrong kinerja dengan mengadakan sosialisasi kepada mitra stretegis pelaksana pekerjaan jasa konstruksi dengan menghadirkan narasumber dari Provinsi.



Gambar 1-3
Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Pekerjaan Konstruksi 2019

3. Prosentase Ruang Terbuka Hijau Privat dengan capaian kinerja 191%

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat merupakan ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH Privat capaian terbesar dikarenakan RTH yang sudah dimiliki instansi/perkantoran Pemerintah dan Intansi Pertahanan Keamanan yang cukup besar, ditambah dari sektor perumahan formal dimana terdapat pengendalian yang dilakukan saat pengurusan perizinan siteplan perumahan dengan 10% Koefisien Dasar Hijau pada kaveling

Sedangkan RTH publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Target indikator ini adalah 20% dari luas wilayah Kota Magelang. Secara perhitungan ideal luasan RTH di Kota Magelang memiliki kekurangan. Tersedianya luasan Kekurangan luasan RTH akan sangat sulit dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan di Kota Magelang. Program dan kegiatan pada bidang RTH harus difokuskan pada upaya peningkatan jumlah (kuantitas) luasan, tidak hanya pada peningkatan kualitas aspek visual (estetika) dari RTH khususnya taman kota. Peningkatan kuantitas lahan RTH dilakukan dengan pembebasan lahan pada sepadan Jalan dan Sungai, pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% bagi pengembang serta pembebasan melalui pembelian tanah masyarakat untuk RTH.

Faktor yang mendorong tetap tingginya kinerja indikator RTH adalah adalah:

- a. Program Magelang Kota Sejuta Bunga. Program ini sangat sinergi dengan uapaya mempertahankan RTH Kota Magelang melalu kegiatan penanaman pohon di pinggir jalan, tanah-tanah kosong milik perorangan maupun swasta dan pembangunan taman.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Magelang yang dituangkan dalam rencana tata ruang Kota Magelang.

Capaian kinerja indikator RTH publik pada tahun 2019 dibandingkan dengan target pada RPJMD tahun 2021 yaitu masih dalam kategori capaian kinerja yang tinggi yaitu 86%. Namun demikian, tantangan dalam mempertahankan dan menyediakan RTH sebesar 20% dari wilayah Kota Magelang tidaklah mudah, mengingat kebutuhan lahan untuk pembangunan Kota Magelang juga sangat tinggi.

Urusan ini masih mempunyai 1 (satu) indikator kinerja rendah dan 1 (satu) sangat rendah dari yang ditargetkan berupa:

1. Prosentase Infrastruktur yang Memenuhi Standar Aksesibilitas (54,72%)

Indikator pencapaian *universal access* tersebar kedalam indikator pada urusan lain, berupa bangunan gedung seperti pasar daerah, kawasan strategis daerah dan fasilitas kesehatan untuk mengakomodasi penduduk semua umur dan penyandang disabilitas, sedangkan dalam hal aksesibilitas dalam infrastruktur berupa trotoar/pedestrian yang diarahkan untuk memenuhi pencapaian target dari indikator ini. Sampai dengan Tahun 2019 Panjang trotoar yang sudah dilengkapi sarpras aksesibilitas sepanjang 104,132 (43,78%) meter dari total pedestrian Kota Magelang yang mencapai 237,830 meter. Permasalahan yang dialami adalah masih terdapatnya ruas trotoar yang kemudian digunakan untuk kegiatan lain seperti penanaman pohon dan lapak jualan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta masih ada beberapa trotoar yang digunakan untuk parkir, untuk permasalahan internal masih banyak ruas jalan yang belum sesuai dengan *universal design*. Karena fokus pemenuhan dari pusat kota ke pinggiran secara bertahap dan keterbatasan lahan daerah milik jalan untuk pemenuhan trotoar sesuai spesifikasi Jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder.



Gambar 1-4
Jalur Pedestrian di Kota Magelang

2. Rasio Ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) 8,33 %

Sampai dengan Tahun 2019 masih terdapat 1 Perda yaitu Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, sedang target di akhir Tahun sudah harus tersedia, sebanyak 12 dokumen yaitu 1 Perda RTRW, 5 perda RDTRK dan 6 perwal RTBL. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya hasil evaluasi 5 tahunan RTRW terdapat deviasi (penyimpangan) rencana ruang, yang menyebabkan Revisi Perda RTRW. Adapun Revisi memerlukan proses yang cukup panjang mulai dari Tahun 2017, sampai akhir Tahun 2019 sudah masuk tahap akhir berupa pengajuan evaluasi Gubernur Jawa Tengah, setelah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN dan kesepakatan antara DPRD dan Walikota Magelang atas Revisi Perda tersebut. Setelah ditetapkan Perda RTRW, maka akan disusun RDTRK 5 BWP/BWK, pada tahap pembaharuan data dan analisis sesuai pedoman penyusunan baru, dan akan masuk program legislasi daerah Tahun 2021 dalam satu kesatuan Raperda. RTBL sudah tersedia 2 raperwal yaitu Kawasan Alun-alun dan Kawasan Lembah Tidar (2019), sedangkan di Tahun 2020 tidak ada mengingat realokasi anggaran dan baru di Tahun 2021 akan diajukan kembali penyusunan 2 raperwal RTBL Kawasan Sidotopo dan Kawasan Sukarno Hatta.

Status 22 (dua puluh dua) indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 19 (sembilan belas) indikator diperkirakan akan tercapai sampai dengan akhir periode RPJMD, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya perlu upaya keras dan inovasi untuk dapat mencapai target sampai tahun 2021 yaitu: Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL), dan Prosentase Infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan tata ruang dan kewajiban bangunan ber-IMB
3. Pemberian keringanan berupa penambahan kuota kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat terutama untuk bangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah/tidak mampu;
4. Peninjauan kembali terkait kajian penempatan reklame dan IMB-nya;
5. Mengajukan program legislasi daerah untuk pentapan Raperda RDTRK BWP III, IV, dan V menjadi Perda;
6. Pembaharuan peta analog sebagai dasar evaluasi dan penyusunan Dokumen Operasional RTRW (RDTR dan RTBL);
7. Pelengkapan jalan utama kota dengan jalur pedestrian yang baik dan layak, dengan mengakomodasi *universal access design*;
8. Sosialisasi percepatan rekomendasi teknis perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi;
9. Pemeliharaan saluran irigasi, dan pensertifikatan aset di Saluran milik Daerah;
10. Melakukan fokus penyelesaian pada bangunan-bangunan di kawasan strategis kota terutama Kawasan Gelanggang Olah Raga Sanden dan Kawasan Gunung Tidar;
11. Koordinasi pengelolaan dan pengairan dengan mitra kerja BBWS Serayu Opak (Kementerian), dan Balai PSDA Progo-Bogowonto-Luk Ulo Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
12. Penyediaan/rehabilitasi irigasi teknis penunjang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah
13. Pemenuhan kelengkapan alat kebinamargaan dan laboratorium teknis;
14. Rehabilitasi Jalan Kota sesuai spesifikasi teknis dan kualitas jalan dan perlengkapan jalan dalam mendukung *universal access*;
15. Mempertahankan capaian kualitas pelaksanaan jasa konstruksi dengan bermitra dengan APH (kejaksaan dan kepolisian) dan praktisi dari akademisi.

1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Cacaban	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0	100%	ST	100%	ST	Disperkim
2	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Gelangan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	3,36	1,47%	SR	1,47%	SR	Disperkim
3	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0	100%	ST	100%	ST	Disperkim
4	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0	100%	ST	100%	ST	Disperkim
5	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kedungsari	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0	100%	ST	100%	ST	Disperkim
6	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kemirirejo	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0,80	79,43%	T	79,43%	T	Disperkim
7	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0	100%	ST	100%	ST	Disperkim
8	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0	100%	ST	100%	ST	Disperkim
9	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magelang	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0,4	89,58%	T	89,58%	T	Disperkim

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
10	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magersari	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0,92	87,81%	T	100%	ST	Disperkim
11	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Panjang	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0,8	79,39%	T	79,39%	T	Disperkim
12	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Potrobangsari	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0	100%	ST	100%	ST	Disperkim
13	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	1,12	83,31%	T	83,31%	T	Disperkim
14	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	1,298	90,47%	T	90,47%	T	Disperkim
15	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0,38	96,83%	ST	96,83%	ST	Disperkim
16	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	1,3305	84,29%	T	84,29%	T	Disperkim
17	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Wates	Rasio luas kawasan Kumuh	0	0	0,37	96,05%	ST	96,05%	ST	Disperkim
18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk berakses air minum	100%	100%	96,05%	96,05 %	ST	96,05 %	ST	Disperkim
		Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90%	90%	99,2%	110,3 %	ST	110,3 %	ST	Disperkim
		Tersedianya sistem air limbah skala Kawasan* (Tujuan 6)	10%	10%	6%	60 %	R	60 %	R	Disperkim
19	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	5 unit	3 unit	4 unit	133%	ST	80%	T	Disperkim
20	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase RTLH	0 %	1,7 %	11,02 %	-448 %	SR	0 %	SR	Disperkim

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, 2020

Indikator kinerja pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 22 indikator. Terdapat 12 (dua belas) indikator yang capainnya sangat tinggi (ST), 7 (tujuh) indikator yang capainnya tinggi (T), 1 (satu) indikator yang capaiannya rendah (R) dan 2 (dua) indikator dengan capaian sangat rendah (SR).

Dari 12 (dua belas) indikator dengan capain sangat tinggi dan 7 (tujuh) indikator dengan capaian tinggi. Adapun masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Persentase luas kawasan kumuh di 7 (tujuh) Kelurahan Kota Magelang capaiannya sangat tinggi dan sesuai dengan target pada tahun 2019 sudah mencapai 0% akan tetapi juga masih ada 10 (sepuluh) kelurahan yang belum mencapai sesuai target yang telah ditentukan yaitu 0%. Total kinerja capaian penanganan luas kawasan kumuh sebesar 91,1%, persentase penduduk berakses air minum capaiannya sebesar 96,05%, dan tersedianya sistem air limbah setempat capaiannya sebesar 110,3%. Ketiga indikator ini saling terkait mendukung program pusat 100-0-100.

Total penanganan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2019 telah tertangani seluas 110,3955 Ha sehingga dibandingkan dengan luas kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota tahun 2015 tinggal tersisa 10,7785 Ha atau tinggal 8,9%. Walaupun belum sesuai dengan target di RPJMD Kota Magelang dimana tahun 2019 kawasan kumuh sudah harus 0%, akan tetapi tetap optimis dengan upaya keras maka pada akhir tahun RPJMD 2021 kawasan kumuh akan tercapai sesuai target 0%.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator tersebut antara lain kinerja capaian diantaranya dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang bersama mitra seperti KOTAKU dan IUWASH PLUS, dunia usaha, seperti kredit sanitasi di Bank Magelang, berbagai organisasi masyarakat, serta dengan Forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan mitra lainnya dalam pengurangan kawasan kumuh. Dengan berbagai upaya tersebut, dari luasan kawasan kumuh semula di Kota Magelang berdasarkan SK Walikota Tahun 2015 seluas 121,17 telah berkurang. Sesuai dengan SK Walikota Magelang No 050/105/II.2 Th 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Magelang, luasan permukiman kumuh telah turun menjadi 67,405 Ha pada Tahun 2018. Baseline data Tahun 2018 ini juga dipergunakan Kotaku sebagai rujukan penanganan kumuh Kota Magelang.

2. Persentase Penduduk berakses air minum dengan capaian kinerja 96,05% (ST),
3. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan capaian kinerja 110,3 % (ST),
4. Tersedianya sistem air limbah skala kawasan dengan capaian kinerja 60% (S) merupakan indikator dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdapat 3 indikator kinerja pada Tahun 2019.

- a. Indikator prosentase penduduk atau KK yang berakses air minum secara teknis ditangani oleh 2 (dua) lembaga yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang. Dimana akses air minum terdiri dari 2 jenis yaitu jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Pemerintah Kota Magelang dalam urusan sektoral air minum optimis dapat tercapai 100%. Hal ini dikarenakan agenda sektoral air minum yaitu rencana pengamanan air minum daerah berupa kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Dalam jangka menengah-panjang akan dihadapkan pada keempat isu tersebut bukan sekedar akses. Permasalahan yang terinventarisasi adalah keterbatasan dana, keterbatasan bahan baku air minum, dan sebagian masyarakat keberatan membayar. Keterbatasan pendanaan akibat dari penanaman modal yang harus digulirkan karena sistem perpipaan induk sebagian besar baik pengambilan air/intake, perpipaan transmisi, reservoir, maupun distribusi masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan sebagian besar peninggalan zaman Belanda. Keterbatasan air baku karena dari ke-6 sumber mata air hanya Tuk Pecah yang berada di Kota, dan keberatan membayar disebabkan ketidakmampuan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah membayar beban penggunaan air setelah berpindah ke meteran air berekening. Dalam pembangunan akses air minum terkendala dalam aset lahan yang digunakan oleh warga, lahan yang digunakan warga untuk membangun rumah merupakan tanah milik PT. KAI. Wilayah magelang memiliki topologi yang beragam, dari dataran rendah dan tinggi, sehingga untuk menjangkau lingkungan dengan topologi tanah yang lebih tinggi mengalami kesulitan dalam penyaluran air, sehingga perlu perencanaan teknis tertentu untuk mengalirkan air. Sumber mata air yang kurang, sehingga debit air yang didistribusikan ke pelanggan kurang sehingga membutuhkan sumber mata air baru agar air yang didistribusikan mencukupi.



Gambar 1-5
Sarana Air Bersih

- b. Indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 110,3% (ST). Indikator ini untuk rumah yang sudah mempunyai Tangki Septik Pribadi, dalam hal “melampaui” dapat diartikan sebagai signal yang baik tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah meningkat di masyarakat Kota Magelang secara umumnya dengan faktor pendorongnya adalah:
- perbaikan sanitasi pembuangan toilet, yakni penggunaan septik tank.
 - mensosialisasikan agar masyarakat tidak membuat saluran pembuangan toilet langsung ke sungai.
 - membangun berbagai fasilitas, seperti toilet dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di beberapa kelurahan yang ada di Kota Magelang
 - masyarakat Kota Magelang semakin cerdas dan mulai membiasakan diri berperilaku bersih dan sehat.

Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, adalah sebagian besar tangki septik rumah tangga belum dapat dipastikan sesuai spesifikasi teknis dan belum melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal. Upaya yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal yang juga didukung dengan peningkatan layanan Pemkot dalam penyediaan sarana prasarana penyedotan

lumpur tinja di masyarakat. Upaya ini didahului dengan perumusan aspek legal formal organisasi terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Potrobangsari, dan pemenuhan armada roda 2 dan 4 dalam mendukung penyedotan air limbah domestik secara terjadwal.

- c. Indikator ketersediaan sistem air limbah skala kawasan, realisasi kinerja Tahun 2019 baru sebesar 60% (R). Faktor kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersedianya sistem air limbah skala Kawasan adalah keterbatasan lahan untuk pembuatan IPAL secara komunal

Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan adanya diberlakukannya Peraturan Walikota terkait UPT pengelolaan air limbah domestik dipersiapkan mendukung dinamika daerah dan mendorong program Pemerintah Kota Magelang ke depan yaitu Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) diharapkan bisa semakin meningkatkan pelayanan Pengelolaan air limbah domestik skala kawasan.

5. Program Pengembangan Perumahan Daerah ditempuh dengan 2 (dua) pendekatan yaitu :
 - a. Pembangunan Rumah Susun (RUSUN) baik Sewa/ Milik dan bagi pondok pesantren serta lembaga sosial keagamaan lainnya, dan
 - b. Pembangunan Rumah Khusus.

Indikator Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni pada Tahun 2019 dengan target sejumlah 3 (dua) buah, telah terealisasi sebanyak 4 buah atau sebesar 133% yang terdiri dari 3 buah rumah susun dan 1 buah rumah khusus. Dengan target akhir RPJMD sebanyak 5 buah akan optimis tercapai, karena akan mengusulkan 2 unit twinblok Rusun baru, dengan memanfaatkan lahan Rusun lama yaitu Rusun Tidar dan Rusun Wates, serta 1 kawasan rumah khusus di Kedungsari yang diperuntukkan bagi MBR dan pekerja sektor Informal. Untuk Rusun sosial-keagamaan, Pemkot hanya memfasilitasi usulan dan tidak dijadikan target kinerja. Eksisting UPTD Rusunawa sekarang menangani 4 rusun, dimana kedepan UPTD juga harus didukung dengan pengorganisasian dan legal formal peraturan pengelolaan yang memadai sesuai beban tugas.

6. Indikator Prosentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) capaiannya sebesar (- 150 %) atau boleh dikatakan sangat jauh dari target yang ditentukan. Adapun target tahun 2019 yang ditetapkan adalah sebesar 1,7%, akan tetapi realisasinya masih 11,02%, sedangkan untuk mendukung program 100-0-100 harusnya sesuai dengan target yang diharapkan adalah 0 %.

Sampai dengan tahun 2019, dari jumlah RTLH semula sebanyak 4.707 pada tahun 2015 telah tertangani sebanyak 1.411 unit rumah, sehingga tersisa sekitar 3.296 yang akan diltuntaskan pada tahun anggaran selanjutnya

Adapun yang menjadi hambatan dan kendala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target yang diharapkan yakni terdapat titik atau lokasi yang tidak dapat terjangkau dalam optimalisasi rumah layak huni, hal ini dikarenakan rumah tidak layak huni tersebut berada pada kawasan squater, dimana salah satu persyaratan utama dalam kegiatan ini adalah adanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dan rumah atau aset yang dimaksud.

Kendala lain yang dihadapi pada wilayah di luar kawasan squater masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni dengan penghuni rumah bukan sebagai pemegang atas Hak Milik Tanah ataupun Bangunan (Rumah)/ bukan merupakan aset pribadi penghuni, banyak diantaranya sebagai penghuni tidak tetap atau penyewa rumah.

Capaian beberapa indikator untuk mencapai akses 100-0-100, pada Tahun 2019, masih perlu upaya kerja keras. Akan tetapi optimis pada akhir tahun RPJMD beberapa indikator untuk mencapai gerakan 100-0-100 akan tercapai. Adapun upaya pencapaian indikator tersebut antara lain dengan mengoptimalkan dan mengkoordinasikan dengan bentuk kerjasama dengan semua pihak dalam rangka melaksanakan Program Penanganan Kumuh Skala Kota antara lain dari beberapa faktor:

1. Bangunan Gedung
 - a. Pengaturan pembangunan lingkungan perumahan
 - b. Peremajaan kawasan
 - c. Penegakan IMB
 - d. Pembangunan rusunawa
 - e. Perbaikan RTLH dan stimulan rumah swadaya
 - f. Penyediaan RTH
2. Drainase
 - a. Penyusunan DED sistem drainase kota

- b. Pembuatan sumur resapan dan biopori
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota
 - d. Pembangunan / rehab shipon
 - e. Pengembangan sistem konservasi air ke dalam tanah
 - f. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan drainase lingkungan
3. Air Limbah
- a. Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik setempat / terpusat
 - b. Pengembangan IPAL pada kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
 - c. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas IPAL / IPLT terpasang
 - d. Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah
4. Sampah
- a. Pengembangan prasarana sampah yang dikelola pemerintah secara terpadu
 - b. Pengembangan prasarana sampah yang dikelola masyarakat
 - c. Pendampingan KSM / kampung organik
 - d. Program lingkungan perumahan sehat
 - e. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
5. Air Minum
- a. Pembangunan jaringan air bersih perpipaan kota
 - b. Meningkatkan kualitas air baku menjadi air minum secara bertahap
 - c. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
 - d. Pembangunan SPAM
 - e. Rehab dan optimalisasi fasilitas air bersih
6. Jalan Lingkungan
- a. Pengembangan jalan penghubung antar permukiman
 - b. Program pembangunan jalan dan jembatan
 - c. Rehab / pemeliharaan jalan dan jembatan
7. Proteksi Kebakaran
- a. Pengembangan sistem hidran kebakaran sesuai RISPK
 - b. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - c. Pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - d. Penyusunan peta rawan bencana
 - e. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
 - f. Penyuluhan bahaya kebakaran
8. Potensi Ekosobud
- a. Pengembangan IKM dan kewirausahaan
 - b. Pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - c. Pengembangan teknologi pertanian, peternakan, dan budidaya perikanan
 - d. Promosi dan kerjasama investasi
 - e. Peningkatan pemasaran hasil produksi
 - f. Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh, keragaman budaya dan kesenian daerah
 - g. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi
 - h. Penyusunan dokumen perencanaan desa wisata

Dari 22 indikator urusan perumahan dan permukiman, 19 indikator diperkirakan akan tercapai sampai akhir RPJMD, sedangkan 3 indikator lainnya perlu upaya keras dan inovasi untuk dapat mencapai target sampai dengan berakhirnya masa

RPJMD 2016-2021. Ketiga indikator yang capainnya masih rendah dan sangat rendah tersebut adalah: rasio kawasan kumuh di Kelurahan Gelangan, tersedianya system ai limbah skala kawasan dan prosentase RTLH.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan sinkronisasi dan kolaborasi antar sektor dan antar stake holder dalam upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dengan perencanaan dan implementasi multi sektor secara komprehensif melalui Program Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau (Kampung Teduh).
2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengentasan kawasan kumuh di kawasan illegal
3. Kolaborasi dengan perbankan dalam penyediaan kredit sanitasi dan air minum
4. Meningkatkan layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tak terjadwal
5. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman
6. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
7. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPMD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	10	10	100%	ST	100%	ST	Kesbangpol
		Terpublikasikannya dialog antar agama	12	8	8	100%	ST	66,67%	S	Kesbangpol
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	4	2	2	100%	ST	50%	SR	Kesbangpol
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Kesbangpol
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	ST	200%	ST	Kesbangpol
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	100%	56,25%	100%	178%	ST	100%	ST	Kesbangpol
		Persentase ormas yang difasilitasi	9,84%	8,66%	8,16%	94,25%	ST	82,93%	T	Kesbangpol
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	80%	75,35%	94,19%	ST	94,19%	ST	Kesbangpol
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila	0%	0%	0%	100%	ST	100%	ST	Kesbangpol
		Perda pelarangan peredaran narkoba	0	0	1	-	-	-	-	Kesbangpol
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	6	4	4	100%	ST	66,67%	S	Kesbangpol
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,81%	1,3%	71,91%	S	50,58%	R	Kesbangpol
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	9,11%	9,71%	106,55%	ST	64,73%	R	Kesbangpol
		Rasio jumlah siskamling aktif	1,00	90,84%	95,05%	104,68%	ST	95,05%	ST	Kesbangpol
4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	47,5%	42,5%	40,22%	94,64%	ST	84,67%	T	Satpol PP
		Cakupan tim relawan siaga bencana	14,71	8,82%	100%	1133,79%	ST	679,81%	ST	Satpol PP
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	100%	75%	100%	133,33%	ST	100%	ST	Satpol PP
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	75%	49,83%	66,44%	S	49,83%	SR	Satpol PP
		Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bagian Kesra Setda
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana:	35,29%	17,64%	23,53%	133,39%	ST	65,83%	S	Satpol PP
		Pratama	5	3	3	100%				
		Madya	0	0	1	100%				
		Utama	0	0	0	0				
		Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada	ada	ada	100%	ST	100%	ST	Satpol PP
5	Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	1	1	100%	ST	100%	ST	Kesbangpol
		Tingkat partisipasi politik	-	79%	86,9%	110%	ST	-	-	Kesbangpol
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	74,8%	1,94%	2,60%	SR	2,4%	SR	Kesbangpol

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
		Database ormas yang akurat	77%	73%	80,41%	110,15%	ST	104,43%	ST	Kesbangpol
		Presentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57,39%	42,59%	45,71%	107,43%	ST	79,65%	ST	Kesbangpol
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari	100%	ST	100%	ST	Satpol PP
		Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	100%	95%	100%	105%	ST	100%	ST	Satpol PP
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	8	6	16,73	261,03%	ST	209,12%	ST	Satpol PP
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	16,67	6,41%	6,42%	100,19%	ST	38,51%	SR	Satpol PP
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	98%	96%	100%	104,17%	ST	102,04%	ST	Satpol PP
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77,27	77,27	78,82	102,01%	ST	102%	ST	Satpol PP
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	23,97%	17,12%	35,15%	205,28%	ST	146,64%	ST	Satpol PP
		Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	21	15	6	40%	SR	28,57%	SR	Satpol PP
8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyakit masyarakat	95%	92%	100%	109%	ST	105,26%	ST	Satpol PP
		Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	NA	1	1	100%	ST	-	-	Satpol PP
		Perda yang mengatur peredaran peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-	1	1	100%	ST	-	-	Satpol PP
9	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	75%	50%	55,17%	110,34%	ST	73,56%	S	Bag Kesra Setda
		Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat	5%	5%	-2,27%	-45,45%	SR	-45,45%	SR	Bag Kesra Setda
		Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67%	66,67%	73,33%	110%	ST	110	ST	Bag Kesra Setda
		Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5	5	7	140%	ST	140%	ST	Bag Kesra Setda
		Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	20%	10%	9,56%	95,57%	ST	47,8%	SR	Bag Kesra Setda
		Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	1	0	1	100%	ST	100%	ST	Bag Kesra Setda
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	90%	100%	111%	ST	105,26%	ST	Bag Kesra Setda
		Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	30%	15%	16,67%	111,11%	ST	55,57%	R	Bag Kesra Setda
		Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	2	1	0%	0%	SR	0%	SR	Bag Kesra Setda
10	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	100%	79,00%	76,10%	96,34%	ST	76,10%	T	Kesbangpol

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kesbangpol Kota Magelang, 2020

Kinerja indikator urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat hingga tahun 2019 secara umum berjalan dengan baik. Sebanyak 86,96% (40 indikator) berkinerja sangat tinggi; 4,35% (2 indikator) berkinerja sedang; dan 8,69% (4 indikator) memiliki kinerja sangat rendah.

Indikator urusan Ketentraman, Keterampilan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu:

1. Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin

Capaian indikator ini mencapai 200% didorong oleh pentingnya kemitraan dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Magelang. Mitra utama yang terjalin adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Non Struktural, dan Forkompimda.

2. Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini

Anggota FKDM di Kota Magelang sebanyak 160 orang dan seluruhnya sudah mendapat pelatihan deteksi dini. Pencapaian kinerja indikator ini didorong oleh adanya strategi penciptaan ketertiban umum dan ketentraman di Kota Magelang yang difokuskan pada pendeteksian dan pencegahan dini.

3. Cakupan tim relawan siaga bencana

Indikator ini mencapai kinerja 1.133,79% dari target sebesar 8,82% pada tahun 2019 telah tercapai 100% karena dari total 270 relawan tanggap bencana yang dibentuk sudah mendapat pembekalan informasi terkait kesiapsiagaan bencana. Faktor pendorong pencapaian kinerja ini adalah pembentukan kelurahan tanggap bencana di Kota Magelang. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana salah satu komponen yang harus dipenuhi adalah adanya tim relawan penanggulangan bencana yang terlibat aktif dan mendapat peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan.

4. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi pamong praja di Kota Magelang sebanyak 218 orang dari total jumlah penduduk 130.289 jiwa. Kota Magelang sebagai kota jasa perlu didukung kondisi daerah yang stabil sehingga mendorong pemenuhan personil polisi PP yang sesuai PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kebutuhan personil Satpol PP ini dipenuhi melalui bantuan Satpol PP dengan status tenaga harian lepas mengingat rekrutmen ASN terbatas jumlahnya.

5. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas

Pencapaian indikator ini melampaui target didorong oleh upaya mengoptimalkan petugas linmas untuk mendukung kondusivitas Kota Magelang sebagai kota jasa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat tugas linmas adalah untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, masih terdapat indikator yang kinerjanya Rendah dan Sangat Rendah ($\leq 65\%$), yaitu:

1. Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 20 orang dari tahun sebelumnya namun peningkatan ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Upaya pencapaian indikator terhambat oleh data yang tidak menggambarkan kondisi riil di awal rencana. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan ini menjadi penting untuk diupayakan mengingat adanya isu nasional terkait radikalisme yang juga harus diwaspadai pada level daerah.

2. Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas

Dari target 16 regu patroli Linmas hingga akhir tahun 2019 baru mencapai 6 regu patroli. Faktor penghambat patroli linmas ini adalah belum optimalnya koordinasi dengan linmas yang bertugas pada skala kelurahan dan lingkungan. Ke depan diperlukan strategi pelaksanaan patroli dalam regu lebih kecil dan jangkauan wilayah lingkungan setempat. Patroli diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti tawuran antar pelajar maupun perkelahian oknum kelompok pendukung olahraga yang masih beberapa kali terjadi di Kota Magelang.

3. Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur

Realisasi indikator ini pada tahun 2019 hanya mencapai Rp. 1.321.075.696,00 menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 1.351.795.946,50. Penurunan ini disebabkan adanya ASN pensiun sementara jumlah ZIS tidak bertambah. Pengelolaan ZIS ASN Kota Magelang oleh BAZNAS sifatnya sukarela berdasarkan surat edaran dan tiap tahunnya belum diperbarui sehingga sosialisasi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS belum dilakukan secara berkesinambungan.

4. Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat

Pada tahun 2019 sudah disusun surat edaran untuk zakat gaji 13 dan 14 tetapi belum disetujui sehingga target belum tercapai. Upaya advokasi perlu dilakukan lebih intensif kepada pihak terkait agar penghambat penyediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat dapat teratasi.

Jika disandingkan dengan target RPJMD tahun 2021, kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian untuk bisa terpenuhi. Meskipun dari target tahunan 2019 mayoritas tercapai, namun terhadap target akhir RPJMD pencapaiannya adalah sebanyak 54,35% indikator berkinerja sangat tinggi; 6,52% indikator berkinerja tinggi; 8,69% indikator berkinerja sedang; 6,52% indikator berkinerja rendah; dan 17,39% indikator berkinerja sangat rendah. Indikator-indikator yang jika disandingkan dengan target akhir RPJMD capaiannya masih rendah dan sangat

rendah, akan tetapi melampaui target tahunan di tahun 2019 secara umum optimis untuk memenuhi target di akhir tahun RPJMD. Kinerja indikator-indikator tersebut masih dalam koridor pentahapan pencapaian target sehingga optimis untuk tercapai.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Mempertahankan kinerja capaian indikator yang positif;
2. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal;
3. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dalam pemenuhan standar rumah ibadah masyarakat;
4. Mengoptimalkan potensi penerimaan ZIS dari ASN Kota Magelang melalui sosialisasi berkesinambungan;
5. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum baik secara personal maupun kelompok seperti Linmas.

1.6 Urusan Sosial

Target dan realisasi indikator urusan sosial tahun 2019 sesuai dengan indikator RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD Sd.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target 2019		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinsos
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	35%	43.42%	124,05%	ST	109%	ST	Dinsos
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinsos
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	16,74%	13%	10,27%	78,98%	T	61%	T	Dinsos
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Dinsos
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	7	5	7	140%	ST	100%	ST	Dinsos
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	40%	100%	250%	ST	167%	ST	Dinsos
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	90%	80%	100%	125%	ST	111%	ST	Dinsos
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	83%	67%	81,82%	122,12%	ST	99%	ST	Dinsos
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	40%	30%	40.74%	135,80%	ST	102%	ST	Dinsos

Sumber : Dinas Sosial Kota Magelang, 2019

Dari ke-10 (sepuluh) indikator kinerja urusan sosial, terdapat 9 (sembilan) indikator yang capaiannya sangat tinggi dan 1 (satu) tinggi. Indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD) yaitu Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Realisasi indikator ini telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) ditumbuhkan oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Semangat gotong royong saling berbagi menjadi sebuah spirit untuk tumbuhnya kebersamaan di dalam masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, hampir semua indikator urusan ini sudah memiliki status capaian ST dan hanya satu indikator dengan status capaian Tinggi yaitu indikator Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Kondisi ini diharapkan terus terjaga sehingga target tersebut dapat tercapai sampai dengan akhir RPJMD.

2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja pada tiap program dapat dilihat pada Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian RKPD Tahun 2019						PD Penanggung Jawab
				Target 2019	Capaian 2019	Thd Target 2019		Thd target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Wirausaha Baru	10%	5%	26%	522%	ST	260%	ST	Disnaker
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	75%	85.62%	114%	ST	107%	ST	Disnaker
		Persentase pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	80%	70%	71%	101%	ST	89%	ST	Disnaker
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	7.50%	5%	34%	681%	ST	442%	ST	Disnaker
		Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	80%	70%	47.07%	67%	S	59%	S	Disnaker
		Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	7.50%	5%	0.33%	7%	SR	4%	SR	Disnaker
3.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Coverage asuransi tenaga kerja* (Tujuan 10)	75%	70%	52.67%	75%	T	70%	S	Disnaker
		Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	50%	89%	178%	ST	178%	ST	Disnaker

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2020

Dari 8 indikator kinerja urusan ketenagakerjaan, terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya sangat tinggi, 1 (satu) indikator yang capaiannya tinggi dan 1 (satu) indikator capaiannya sedang dan 1 (satu) indikator capaiannya sangat rendah. Beberapa dari 8 indikator kinerja tersebut capaiannya melebihi 150% yaitu:

1. Persentase Wirausaha Baru, faktor pendorongnya adalah :
 - a. Tingginya minat/ tekad pencari kerja untuk melakukan usaha mandiri. Dari hasil seleksi/ rekrutmen peserta pelatihan diketahui adanya minat untuk berwirausaha/ berusaha mandiri. Dari 185 peserta pelatihan 46 orang menyatakan keinginannya untuk berwirausaha,
 - b. Dimasukkannya materi *softskill* AMT (*Achievement Motivation Training*) dalam kurikulum pelatihan kerja. Peserta pelatihan yang telah menyatakan diri untuk berusaha mandiri dapat diarahkan untuk memperkuat motivasinya dalam kurikulum ini. Dari 46 orang yang telah menyatakan untuk berwirausaha, 12 orang telah memulai usaha mandiri di akhir tahun 2019.
2. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi BNSP, faktor pendorongnya adalah:
 - a. Pemberlakuan program dan kurikulum sesuai dengan SKNNI
Dari 5 jenis pelatihan kerja (16 paket), 3 jenis pelatihan kerja (9 paket) telah memasukkan program dan kurikulum sesuai dengan SKNNI
 - b. Dana APBN yang diterima menjadi contoh pemberlakuan SKNNI
Dari 16 paket pelatihan kerja, 10 paket pelatihan kerja merupakan dana dari APBN.
3. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB, faktor pendorongnya adalah:
 - a. Fasilitasi dari mediator dalam memediasi perselisihan antara pekerja dan perusahaan.
Dari 9 pekerja yang memiliki perselisihan HI, 1 orang diselesaikan melalui bipartit, 7 orang dapat dimediasi dengan perjanjian bersama dan 1 orang diselesaikan dengan anjuran.
 - b. Adanya itikad baik dari kedua pihak untuk menyelesaikan.
Itikad baik ditunjukkan melalui penyelesaian secara bipartit dan perjanjian bersama. Dari 5 kasus perselisihan, 4 kasus menunjukkan itikad baik kedua belah pihak.

Disisi lain terdapat satu indikator yang masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah:

1. Sertifikasi kompetensi belum menjadi standar utama dalam penilaian kemampuan karyawan.
2. Tidak semua perusahaan melaksanakan re-skilling ataupun up-skilling bagi tenaga kerjanya.

Pencapaian kinerja yang cukup tinggi di tahun 2019 tidak lepas dari kerjasama dengan mitra kerja yaitu pengguna tenaga kerja/perusahaan. Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Beberapa upaya yang telah dilakukan di tahun 2019 bersama mitra kerja yaitu:

1. Memberikan motivasi dan pengenalan dunia kerja kepada calon angkatan kerja di lingkungan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan pencari kerja agar dapat memasuki dunia kerja dan dapat memperpanjang retain/masa kerjanya.
2. Melakukan rekrutmen secara berkala dengan pengguna tenaga kerja/perusahaan dan LPTKS yang dilaksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja sehingga dapat membantu perusahaan/LPTKS untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan dan membantu pencari kerja agar perekrutan dilakukan di daerah domisilinya (mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari kerja).
3. Melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja secara berkala untuk memberikan tips membuat dokumen lamaran pekerjaan dan menghadapi wawancara kerja.
4. Memberikan bimbingan pengenalan diri kepada pencari kerja untuk mengetahui minat dan bakat diri, agar dapat memilih jenis jabatan yang sesuai.

Dari 8 indikator urusan ketenagakerjaan, 5 indikator diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD, 2 perlu upaya untuk mewujudkannya, sedangkan 1 indikator perlu upaya keras dan inovasi untuk dapat mewujudkannya di akhir perencanaan RPJMD 2016-2019. Dua indikator yang perlu upaya adalah: Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan Coverage asuransi tenaga kerja. Sedangkan 1 indikator yang perlu upaya keras adalah Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana BLK
2. Pemenuhan instruktur
3. Melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar
4. Meningkatkan ketrampilan, kemadirian dan daya saing pencari kerja
5. Meningkatkan layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses dengan mudah melalui layanan online

2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Ada	Ada	100%	ST	100%	ST	DP4KB
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	55,79%	50%	63,41%	126,82%	ST	113,66%	ST	DP4KB
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT (Tujuan 16)	0,04%	0,04%	0,006%	666,67%	ST	666,67%	ST	DP4KB
		Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Tujuan 5, 16)	15	18	17	105,89%	ST	88,24%	T	DP4KB
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (Tujuan 5)	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KIP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Tujuan 16)	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	8%	5%	19,96%	399,2%	ST	249,5%	ST	DP4KB
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	23%	5,07%	22,04%	SR	16,9%	SR	DP4KB
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	35%	26%	11,37%	43,73%	SR	32,49%	SR	DP4KB
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,00%	79%	59,17%	74,9%	S	73,96%	S	DP4KB

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara agregat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkatagori cukup baik, hal tersebut terlihat dengan adanya 12 indikator kinerja berpredikat sangat tinggi, 1 indikator kinerja berpredikat sedang, dan 2 indikator dengan predikat sangat rendah. Adapun capaian indikator sangat rendah adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta yang merupakan hasil perhitungan dari jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta, dibandingkan dengan jumlah perempuan bekerja (wanita usia produktif 20 tahun sampai dengan 59 tahun) pada tahun berjalan.

Pada tahun 2019 dari jumlah angkatan kerja perempuan hasil penghitungan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yaitu sebesar 40.493 orang terdapat sebanyak 2.055 orang perempuan bekerja di lembaga pemerintah di Kota Magelang. Adapun jumlah angkatan kerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2019 tercatat sebanyak 4.607 orang. Dari hasil penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwasannya masih terdapat kesenjangan atau gap yang cukup tinggi pada angka partisipasi perempuan khususnya yang bekerja di sektor pemerintah dan swasta, sehingga kedepan perlu dirumuskan suatu strategi untuk mempercepat pemberdayaan perempuan sehingga perempuan dapat lebih kompetitif dalam lapangan kerja. Hal tersebut secara langsung memberi kontribusi terhadap minimnya angka capaian kinerja prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang yaitu sebesar 74,9% atau terkategori sedang. Adapun indikator ratio KDRT dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki kinerja capaian yang sangat tinggi yaitu sebesar 666,67%, hal tersebut dikarenakan adanya penetapan target yang terlalu tinggi, sedangkan jumlah kasus KDRT yang ada di Kota Magelang sangat rendah sehingga kedepan diperlukan upaya rasionalisasi.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 (tiga) indikator yang memerlukan akselerasi percepatan pencapaian yaitu indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta dengan status capaian sangat rendah, serta prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan dengan status capaian sedang. Upaya kedepan untuk mendongkrak pencapaian indikator tersebut diatas adalah dengan memfokuskan program dan kegiatan pemberdayaan untuk perempuan agar kedepan dapat mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan gender yang ada.

2.3 Urusan Ketahanan Pangan

Indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan melibatkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	2	2	100%	ST	100%	ST	Disperpa
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	95%	100%	105,26%	ST	105,26%	ST	Disperpa
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) x (Tujuan2)	87,60%	87,60%	88,70%	101,26%	ST	101,26%	ST	Disperpa

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Target 2019	Kinerja RKPd Th.2019				PD Penanggung Jawab	
					Capaian 2019	Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja		Status
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	80%	100%	125%	ST	125%	ST	Disperpa

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2018

Berdasarkan Capaian kinerja sebagaimana matrik diatas, kinerja dari keempat indikator urusan ketahanan sangat tinggi, bahkan 3 (tiga) Indikator capaiannya melebihi target. Adapun masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan, dengan target 95 dan tercapai 105% yang disebabkan oleh:
 - a. kerjasama dengan daerah lain penghasil produksi pangan sehingga unsur atau jenis pangan sudah terpenuhi. Hal tersebut didorong dan didukung oleh adanya manajemen dan kerjasama yang baik dengan dibentuknya tim pendata yang melaksanakan pendataan secara rutin.
 - b. Untuk mewujudkan ketahanan pangan Kota Magelang melakukan kegiatan dengan berbagai upaya difersivikasi pangan yang tidak hanya bergantung pada bahan baku beras.
 - c. Untuk mendukung ketersediaan pangan, perlu dilakukan riset terkait dengan berbagai inovasi dan diarahkan ke komoditas dengan cara pengolahan seperti ketela pohon, ketela rambat, lidah buaya, yang diolah sehingga meningkatkan nilai tambah.
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 101%
 - a. Dengan membangun kesadaran masyarakat terkait dengan pola pangan harapan yang ideal
 - b. Adanya pemenuhan kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan pengankaragaman pangan menuju B2SA
 - c. Tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan tertentu saja, misal pada beras dan terigu saja akan tetapi bisa dengan jenis lain seperti ketela dan jagung.
3. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (125%)
 - a. Capaian dapat melebihi target yang ditetapkan karena adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan setiap bulan dan menjelang hari besar diadakan sidak di beberapa tempat di swalayan dengan mengambil sampel berupa sayuran dan buah dengan sarana dan prasarana yang berupa perlengkapan alat cek lab buah dan sayur. Terdapat peningkatan keamanan pangan bahwa dari data tahun 2018 dari sampel jenis sayur dan buah terdapat pangan tidak aman sebanyak 23 jenis dan ditahun 2019 dengan sampel yang sama, tidak ditemukan adanya bahan formalin/ pengawet sehingga pangan dapat dikatakan aman.

Ketahanan pangan di Kota Magelang berkaitan erat dengan sektor pertanian. Terkait dengan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sampai saat ini adalah masih kurangnya ketersediaan energi dan protein. Hal ini disebabkan rendahnya produksi pangan di Kota Magelang, sebagai akibat dari maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Ketersediaan pangan Kota Magelang sebagian besar distok oleh daerah sekitar Kota Magelang sehingga untuk memenuhi ketersediaan pangan di Kota Magelang yang bergantung pada hasil produksi pangan daerah sekitarnya, seperti Semarang, Yogyakarta, Boyolali, Kabupaten Magelang, Salatiga, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD, ke-empat indikator urusan ketahanan pangan kinerjanya sangat tinggi dan diperkirakan akan dapat tercapat akhir periode RPJMD. Upaya yang akan dilaksanakan pada urusan ketahanan pangan pada tahun 2021 di antaranya:

1. Menjamin keamanan pangan
2. Meningkatkan pengawasan pangan
3. Mempertahankan ketahanan dan ketersediaan pangan
4. Meningkatkan keragaman pangan
5. Optimalisasi lahan-lahan sempit/pekarangan

2.4 Pertanian

Indikator kinerja urusan pertanian melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RRPJM s.d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd target RPJMD		
						Kinerja	status	Kinerja	Status	
1.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	100%	70 %	76.18	108,83%	ST	76%	T	DPUPR
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	100%	70	70	100%	ST	70 %	S	DPUPR

Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasi mengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya *sustainable development* menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secara optimal terintegrasi dalam IDSN.

Salah satu penyebab dari terjadinya konflik agraria adalah kesalahan administrasi dalam pemberian hak atas tanah. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pendaftaran tanah dan memberikan sertifikat kepada masyarakat sebagai bukti hak atas tanah. Namun sayangnya, kepemilikan sertifikat tanah tetap belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan yang sering muncul adalah sertifikat ganda dan konflik atas tanah.

Sengketa tanah yang menghabiskan waktu, tenaga, uang dan merusak hubungan baik antar pihak yang berkonflik dapat dicegah dengan pelaksanaan sistem pengelolaan administrasi pertanahan yang sistematis dan melibatkan perangkat desa yang terlatih.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta maka Sistem Informasi Geografis (SIG) pertanahan harus memakai peta yang sudah terkoreksi dan terverifikasi terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGT). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017, maka terjadi perubahan luas wilayah di Kota Magelang menjadi 18,54 km² sehingga SIG pertanahan perlu menyesuaikan. Hal ini bisa diatasi dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPN terkait kewilayahan.

Dari 2 indikator, apabila dihadapkan pada target akhir RPJMD 1 indikator diperkirakan akan tercapai, sedangkan 1 indikator lainnya yaitu tersedianya sistem informasi geografis pertanahan.

Upaya yang akan dilaksanakan urusan pertanahan pada tahun 2021 antara lain dengan Pembentukan Gugus Reforma Agraria di tiap daerah. Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset plus penataan akses. Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertipikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek Reforma Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

2.5 Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	100%	40	40	100%	ST	40 %	SR	DLH
2	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100	100	100	100%	ST	100 %	ST	DLH
3	Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam	IKA (Indeks Kualitas Air)	76,84	75,90	58,33	76,95 %	T	75,11 %	T	DLH
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	79,1	77,70	87,69	112,85%	ST	110,86 %	ST	DLH
		ITH (Indek Tutupan Vegetasi)	49,56	49,05	38,22	77,92%	T	77,12 %	T	DLH
		Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi*	77,84	67,7	22,22	32,82%	SR	28,55%	SR	DLH
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	ST	100	ST	DLH

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7 m ³	153,7	287,70	12,82%	SR	- 10,46 %	SR	DLH
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	5,3%	5,30	8,84	166,79%	ST	166,79%	ST	DLH
		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani* (Tujuan 11)	100%	90	91,90	102,11%	ST	91,90 %	ST	DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2020

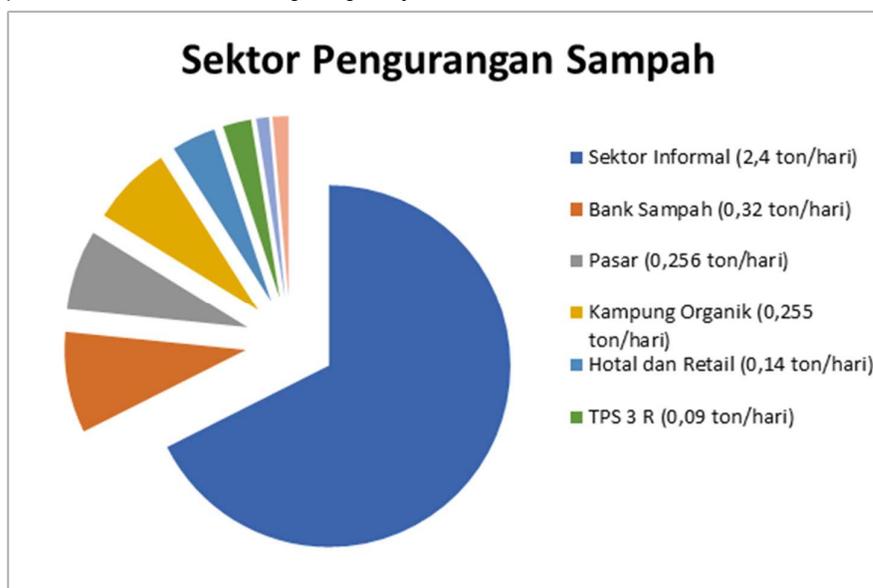
Dari ke 11 (sebelas) indikator, kinerja urusan lingkungan hidup yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 7 (tujuh) indikator capaian kerjanya sangat tinggi (ST), 3 (tiga) indikator capaian kerjanya tinggi (T), dan 1 (satu) indikator capaiannya sangat rendah (SR).

Satu indikator yang kerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu:

1. Berkurangnya volume sampah dari sumbernya dengan capaian kinerja sebesar 166,79%.

Pengurangan sampah merupakan spirit dalam pengelolaan sampah pada tahun 2019 hingga tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Indikator pengurangan sampah dari sumbernya pada tahun 2019 merupakan hasil kerja keras dari seluruh sektor kegiatan dalam pengurangan sampah.

Faktor yang mendorong tingginya capaian kinerja indikator pengurangan sampah dari sumbernya adalah adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah (Pemkot Magelang) dalam menggalakkan pengurangan sampah dari sumbernya melalui berbagai kegiatan seperti kampung organik, bank sampah, pembangun TPST 3 R, pembangunan pusat daur ulang dan kegiatan sekolah Adiwiyata. Peran dari berbagai sektor kegiatan pengurangan sampah pada tahun 2019 di Kota Magelang disajikan dalam Gambar berikut ini.



Gambar 2-1
Sektor Pengurangan Sampah

Faktor kedua (2) pendorong pengurangan sampah dari sumbernya adalah adanya kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Magelang tahun 2019 atau lebih dikenal dengan istilah Jakstrada 2019. Yang mana Jakstrada mengamanatkan adanya pengurangan hingga 30% pada tahun 2025 atau kurang lebih 25,62 ton/hari. Oleh karena itu dengan bercermin pada capaian kinerja pengurangan sampah pada tahun 2019 yang baru mencapai 8,84 ton/hari, maka dalam kurun waktu 2020-2021, DLH Kota harus kerja keras untuk mewujudkan pengurangan sampah hingga 30% pada tahun 2025 dengan meningkatkan kinerja dari masing-masing sektor dalam pengurangan sampah pada sumbernya, karena deviasi pengurangan sampah yang masih tinggi yakni kurang lebih 17 ton/hari.

Dilihat dari target pengurangan sampah pada target yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021, maka target tersebut telah tercapai bahkan lebih. Namun demikian fokus pengurangan sampah dari sumbernya tidak lagi pada target RPJMD 2021 tetapi pada target pengurangan sampah yang telah ditetapkan dalam Jakstrada 2019.

Urusan lingkungan Hidup, yang pada tahun 2019 kinerjanya masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan sangat rendah (SR) yaitu kinerja indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA. Dari target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 153,7 m³ terealisasi 287,7 m³, yang berarti kinerjanya 12,82%. Berdasarkan capaian kinerja volume yang dibuang ke TPSA, data ini memberikan gambaran bahwa volume sampah Kota Magelang pada tahun 2019 yang dibuang ke TPSA 134 m³ lebih tinggi dari target. Hal ini menjadikan beban berat bagi TPSA Banyu Urip yang kondisinya saat ini telah melebihi dayaampungnya.

Peningkatan volume sampah yang dibuang ke TPSA diduga disebabkan oleh:

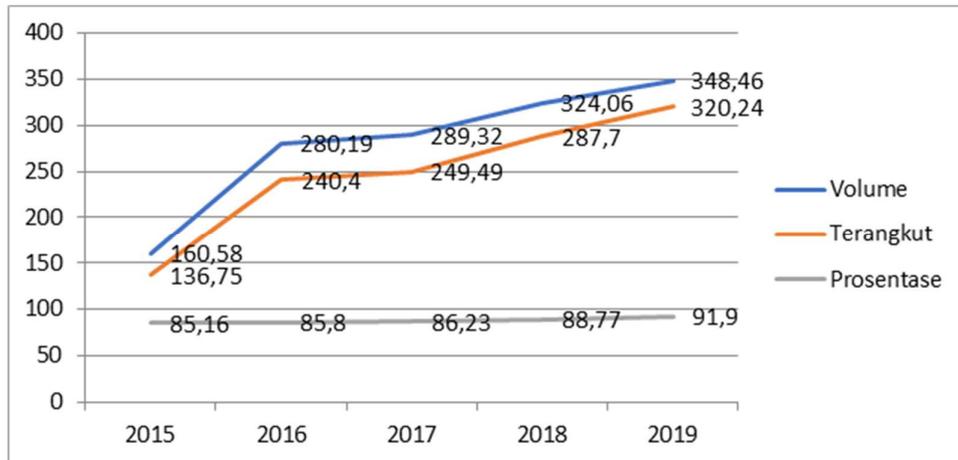
1. Perekonomian Kota Magelang yang semakin membaik sehingga aktivitas masyarakat Kota Magelang meningkat. Peningkatan aktivitas ini tentunya diikuti dengan penggunaan sarana dan prasarana yang berpotensi menghasilkan timbulan sampah seperti peningkatan konsumsi masyarakat, meningkatnya penggunaan plastik, kardus, styrofoam atau kemasan lainnya yang sekali pakai.
2. Semakin menurunnya kepemilikan pekarangan, sehingga semakin sedikit masyarakat yang mengelola sampah dipekarangannya sendiri.
3. Banyaknya event-event yang digelar di Kota Magelang yang secara riil meningkatkan jumlah orang yang berkunjung dan beraktivitas di Kota Magelang, dan pada umumnya juga ikut andil dalam menyumbang produksi sampah. Dari pengalaman lapangan, event karnaval dalam rangka hari jadi Kota Magelang tahun 2019 menyumbang timbulan sampah sebesar kurang lebih 2,64 ton sampah atau kurang lebih 8 m³ sampah.
4. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya mahasiswa dari luar kota yang tinggal di Kota Magelang seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan tinggi di Magelang.
5. Penempatan depo/TPS di daerah perbatasan, dimana lebih banyak diisi oleh warga di luar Kota Magelang yang secara periodik diambil oleh petugas kebersihan menyebabkan meningkatnya jumlah sampah di depo-depo/TPS.
6. Peningkatan volume sampah di obyek wisata yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pengunjung, khususnya pengunjung Gunung Tidar yang mencapai lebih dari 100 ribu pengunjung.

Peningkatan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja pembuangan sampah ke TPSA. Bahkan jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2021, capaian kinerja indikatornya bernilai negatif (-10,46%). Hal ini menjadi indikasi bahwa target volume sampah yang dibuang ke TPSA pada tahun 2021 tidak akan tercapai. Oleh karena itu upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya harus lebih ditingkatkan pada tahun 2020-2025 agar target pengurangan sampah sebesar 25 % dapat dicapai.

Untuk capaian kinerja penanganan sampah perkotaan yang ditangani, hasil kinerja 2019 sangat tinggi yaitu mencapai 102,14%, yang berarti realisasi tahun 2019 melebihi dari target 2019. Namun demikian capaian kinerja ini masih harus ditingkatkan karena belum 100% sampah Kota Magelang bisa tertangani, yang disebabkan:

1. Belum semua petugas kebersihan lingkungan (PKL) mematuhi jadwal membuang sampah di depo sehingga seringkali masih ada sisa sampah di depo yang belum terangkut.
2. Belum seluruh SDM angkutan sampah bekerja sesuai SOP
3. Armada angkut sampah masih perlu dimodernisasi dan ditambah jumlahnya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, masih sering ditemukan sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

Kinerja indikator penanganan sampah yang tertangani menunjukkan trend yang terus meningkat sebagaimana terlihat dalam Gambar sebagai berikut.



Gambar 2-2
Kinerja Indikator Penanganan Sampah yang Tertangani

Capaian Kinerja indikator IKLH yang belum tercapai karena dipengaruhi oleh capaian indikator indeks IPA dan ITH yang belum tercapai 100 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Target IKLH pada RPJMD Kota Magelang ditetapkan pada tahun 2015. Sementara dalam perkembangannya antara tahun 2016-2018 terjadi penyesuaian kriteria dan rumus perhitungan IKA, IKU dan IKTL yang semakin ketat, sehingga target IKLH yang telah ditetapkan menjadi kurang relevan untuk dapat dicapai.

Penyesuaian tersebut meliputi:

- a. Perubahan baku mutu kualitas air yang semula menggunakan status mutu air kelas II, mulai tahun 2016-2017 menggunakan status mutu air kelas I.
 - b. Perubahan metode pengukuran kualitas udara yang semula menggunakan metode pengukuran 1 jam menjadi passive sampler dengan pengukuran selama 24 jam.
 - c. Perubahan kriteria dan indikator parameter dalam perhitungan indeks kualitas tutupan lahan di tahun 2018.
2. Kondisi lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor Internal :

Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan seperti perilaku manusia.

- Data Dinas Kesehatan Kota Magelang (2019) menunjukkan bahwa masih ada 1.090 KK (4,26) yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Perilaku BABS di sungai mempengaruhi kualitas air sungai, sehingga parameter Fecal Coli dan Total Coliform pada perhitungan IKA tidak dapat memenuhi baku mutu.
- Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah domestik dari aktivitas MCK langsung ke sungai. Penggunaan detergen dalam kegiatan MCK dapat menyebabkan tingginya nilai phospat pada perhitungan IKA.

- b. Faktor eksternal:

Faktor eksternal merupakan faktor alam yang tidak dapat dikendalikan seperti perubahan debit air sungai antara musim kemarau dan musim penghujan yang dapat mempengaruhi kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air rata-rata dari 6 (enam) titik sampel pada musim kemarau di Bulan April 2019, menunjukkan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil pengukuran pada musim penghujan di Bulan Oktober 2019.

Aliran sungai yang melintasi antar batas wilayah administrasi juga mempengaruhi nilai IKLH, khususnya terkait dengan indeks kualitas air. Hal ini disebabkan karena saluran irigasi Kali Manggis dan Kali Bening yang digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air melintasi beberapa wilayah administrasi yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Saluran sungai sudah melewati wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang sebelum melintasi Kota Magelang, sehingga kualitas air saluran irigasi sudah membawa potensi beban pencemar dari kawasan hulu saluran. Maka kualitas air yang diukur di wilayah Kota Magelang juga merupakan akumulasi beban pencemaran dari wilayah sebelumnya.

Dari 11 indikator urusan lingkungan hidup, capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, 9 indikator diperkirakan akan tercapai pada akhir periode, 2 indikator perlu upaya keras dan inovatif untuk mencapai target di

akhir periode. Kedua indikator tersebut adalah: prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati dan volume sampah yang dibuang ke TPSA.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan system dan layanan persampahan
2. Meningkatkan kepatuhan petugas kebersihan lingkungan (PKL) dan masyarakat dalam jadwal membuang sampah di depo sehingga seringkali masih ada sisa sampah di depo yang belum terangkut.
3. Meningkatkan kepatuhan SDM angkutan sampah agar bekerja sesuai SOP
4. Modernisasi dan penambahan jumlah armada angkut sampah.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, agar membuang pada tempatnya.
6. Mereduksi timbulan sampah dari sumbernya dengan prinsip 3R
7. Penanganan kera di Kebun Raya Gunung Tidar

2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 program dengan 7 indikator. Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	100%	96,77%	96,77%	ST	96,77%	ST	Disdukkapil
		Cakupan penduduk memiliki KIA	100%	100%	97,08%	97,08%	ST	97,08%	ST	Disdukkapil
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%	99,98%	99,98%	ST	99,98%	ST	Disdukkapil
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	950	940	980,13	104,27%	ST	103,17	ST	Disdukkapil
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disdukkapil
		Persentase kepemilikan Akte kematian	75%	50%	93,51%	155,85%	ST	124,68	ST	Disdukkapil
		Terbangunnya sistem pelayanan administrasi terintegrasi	100%	40%	90,91%	151,52%	ST	90,91%	ST	Disdukkapil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2020

Dari 7 indikator yang ada, semua indikator sudah memiliki status capaian ST (Sangat Tinggi) pada tahun 2019. Kondisi ST berada pada kisaran $91 \leq 100\%$ terdiri dari 4 indikator, sementara 3 indikator lainnya memiliki nilai lebih dari 100%.

Dari semua indikator dengan status ST, terdapat 2 indikator yang memiliki capaian lebih dari 150% yaitu Persentase kepemilikan Akte kematian dan Terbangunnya sistem pelayanan administrasi terintegrasi. Kondisi ini didukung oleh faktor pendorong seperti:

1. Persentase kepemilikan Akte kematian dengan kinerja 155,85% disebabkan adanya sistem jemput bola ketika ada laporan kematian dari kelurahan sehingga dapat langsung tercatat oleh dinas. Selain itu, adanya santunan kematian juga mendorong tingginya capaian indikator ini.
2. Terbangunnya sistem pelayanan administrasi terintegrasi dengan kinerja 151,52%. Kondisi ini didorong oleh adanya inovasi teknologi untuk mendukung pengintegrasian sistem.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, semua indikator urusan ini sudah memiliki status capaian ST. Kondisi ini diharapkan terus terjaga sehingga target tersebut dapat tercapai.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup 6 (enam) program prioritas dengan 12 indikator kinerja, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	52,94%	41,12%	58,82%	143,04%	ST	111,11%	ST	DP4KB
		Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4	4	4	100%	ST	100%	ST	DP4KB
2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase PL KB yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	15	13	13	100%	ST	86,67%	T	DP4KB
		LPM berprestasi								
		Tingkat Kota	64,71%	53%	61,64%	116,3%	ST	86,67%	T	DP4KB
		Tingkat Provinsi	peringkat 1	peringkat 1	peringkat 1	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Tingkat Nasional	peringkat 1	-	-	-	NA	-	NA	DP4KB
		Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR)	100%	-	-	-	NA	-	NA	DP4KB
		Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	70,59%	47%	64,7%	137,66%	ST	91,66%	ST	DP4KB
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	143	143	100%	ST	100%	ST	DP4KB	
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100%	100%	60,94%	60,94%	R	60,94%	R	DP4KB
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	82,35%	68%	68%	100%	ST	82,57%	T	DP4KB
6	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 terkategori cukup baik, hal tersebut ditandai dari 12 indikator kinerja yang ada terdapat 10 indikator kinerja yang memperoleh predikat capaian sangat tinggi, 1 indikator terkategori rendah, dan 1 indikator tidak dapat diukur.

Indikator dengan predikat rendah dan masih perlu upaya keras pemenuhannya adalah indikator cakupan pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipasi pembangunan desa, yaitu dengan capaian kinerja sebesar 60,94%, adapun target yang ditetapkan atas indikator tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 100%. Data sampai dengan tahun 2019 dari seluruh jumlah anggota LPM di Kota Magelang sebanyak 425 orang dan sebanyak 259 orang telah dikutsertakan dalam pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kota, sehingga dalam hal ini masih terdapat 166 orang anggota LPM yang wajib untuk diupayakan pemenuhan peningkatan kapasitasnya melalui pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK), mengingat LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dituntut untuk dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Secara agregat kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun dalam hal ini kedepan masih terdapat 1 (satu) indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya yaitu Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa dengan status capaian rendah.

2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencakup 7 (tujuh) program dengan 28 indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100%	ST	100%	ST	DP4KB
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	1%	2%	0%	100%	ST	100%	ST	DP4KB

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
3	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	81%	79%	79,42 %	100,53%	ST	98,05%	ST	DP4KB
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	81%	68%	69,95%	102,87%	ST	86,36%	T	DP4KB
5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2%	3%	0,03%	10,000%	ST	6.666,67%	ST	DP4KB
6	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15,19%	9%	-	-	NA	-	NA	DP4KB
7	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	3%	4%	6,13%	65,25%	R	48,92%	R	DP4KB
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81%	79%	74,92%	94,84%	ST	92,5%	ST	DP4KB
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	88%	88%	73,87%	83,94%	T	83,94%	T	DP4KB
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan	100%	100%	121,42%	121,42%	ST	121,42%	ST	DP4KB
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	30%	111,76%	372,53%	ST	111,76%	ST	DP4KB
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	30%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	13%	12%	10,12%	84,33%	T	77,85%	T	DP4KB
		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	67%	62%	49,18%	79,32%	T	73,4%	S	DP4KB
		Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	8%	10%	1,69%	591,72%	ST	473,37%	ST	DP4KB
		Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	2%	0,03%	6.666,67%	ST	6.666,67%	ST	DP4KB
		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	95%	90%	100%	111,11%	ST	105,26%	ST	DP4KB
		Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	100%	97%	100%	103,1%	ST	100%	ST	DP4KB
		Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB
		Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%	3%	1,11%	270,27%	ST	180,18%	ST	DP4KB
		Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	1%	0,63%	158,73%	ST	158,73%	ST	DP4KB
Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB		
Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB		
Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB		
Persentase jumlah keluarga sejahtera	91,06%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DP4KB		
Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	75%	90%	100%	111,11%	ST	133,33%	ST	DP4KB		

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 terkategori cukup baik, hal tersebut tergambar dari 28 indikator kinerja yang ada, sebanyak 23 indikator memperoleh katagori nilai capaian kinerja sangat tinggi dan 3 indikator kinerja terkategori tinggi, 1 indikator dengan katagori rendah, serta 1 indikator tidak dapat diukur. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan urusan ini tetap perlu diupayakan konsistensinya agar capaian kinerja tersebut dapat tetap terjaga dan dipertahankan bahkan dapat meningkat, sehingga target akhir RPJMD 2021 dapat tercapai.

Adapun indikator yang memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya karena capaian kerjanya di tahun 2019 tergolong rendah adalah indikator cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi dengan capaian 65,25%. Tingginya angka PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi dapat disebabkan beberapa faktor antara lain masih adanya Wanita Usia Subur

(WUS) yang belum menggunakan kontrasepsi padahal mereka masih memerlukan kontrasepsi tersebut (*unmet need*), kurangnya pengetahuan PUS tentang KB, serta kurangnya dukungan dari suami karena masih kentalnya budaya yang dipegang teguh oleh pasangan usia subur.

Agar kedepan angka tersebut dapat ditekan maka diperlukan komitmen dan upaya-upaya yang harus dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan *unmet need* antara lain melalui:

1. Peningkatan cakupan akseptor KB dalam konteks keterjangkauan, akseptabilitas, ketersediaan dan ketercukupan baik terkait sarana informasi maupun kualitas dan kuantitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.
2. Meningkatkan angka partisipasi pria khususnya yang terkatagori usia subur untuk ber-KB.
3. Peningkatkan pergerakan di lini lapangan dengan memberdayakan institusi masyarakat terutama petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), dan kader KB.

Sedangkan kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun dalam hal ini kedepan masih terdapat 1 (satu) indikator yang memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya yaitu Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri dengan status capaian terkatagori sedang.

2.9 Perhubungan

Indikator kinerja urusan perhubungan melibatkan 6 (enam) program prioritas dan 12 (dua belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd RKP Th. 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah pelayanan umum yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan	1	1	5	500%	ST	500%	ST	Dishub
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	100%	75%	40%	53,3%	R	40%	R	Dishub
		Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata	3	2	1	50%	SR	33,33%	SR	Dishub
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	100%	78%	60,11%	77,1%	T	60,11%	R	Dishub
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	100%	93%	100%	107,5%	ST	100%	ST	Dishub
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	22	19	21	110,5%	ST	95,45%	ST	Dishub
3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	9,25%	8,5%	8,72%	102,6%	ST	94,27%	ST	Dishub
		Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	100%	75%	61,11%	81,5%	T	61,11%	R	Dishub
4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.136	8.036	7.244	90,1%	T	90,1%	T	Dishub
		Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian	4%	4%	7,89%	2,81%	SR	2,75%	SR	Dishub
5	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	2.900.000	2.614.881	90,2%	T	90,2%	T	Dishub
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	7	7	100%	ST	100%	ST	Dishub

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2020

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja urusan perhubungan, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang capaiannya tinggi dan sangat tinggi, 1 (satu) rendah dan 1 (satu) sangat rendah. Namun demikian terdapat indikator yang kinerjanya jauh melampaui target, yaitu:

1. Jumlah pelayanan umum yang sudah dilaksanakan Dinas Perhubungan. Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Dinas Perhubungan Kota Magelang berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perhubungan, dalam bentuk pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan yang meliputi:

- a. Pengujian Kendaraan (Keur)
Pada saat ini jumlah alat transportasi darat semakin meningkat, maka pengujian kendaraan semakin dibutuhkan untuk menjamin agar setiap kendaraan layak jalan. Pengujian angkutan umum ditujukan agar pengguna angkutan umum merasa aman dan nyaman, sehingga jumlah pengguna angkutan umum akan semakin meningkat.
- b. Perparkiran
Tata kelola parkir di Kota Magelang menjadi tantangan karena bertambahnya jumlah kendaraan tidak diimbangi penambahan luas lahan parkir yang memadai.
- c. ATCS (*Area Traffic Control System*)
Area Traffic Control System (ATCS) merupakan sebuah sistem pengaturan lalu lintas bersinyal terkoordinasi mencakup satu wilayah secara terpusat. Melalui sistem ATCS penataan siklus lalu lintas dilakukan berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara *real time* melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan, untuk memperoleh kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien.
- d. Perizinan Trayek
Angkutan merupakan salah satu faktor penunjang bagi perkembangan bidang perekonomian di Kota Magelang. Dengan adanya izin yg dikeluarkan, kendaraan wajib uji dinyatakan masih layak untuk beroperasi dan aman untuk digunakan oleh pengemudi dan masyarakat pengguna jasa angkutan umum.
- e. Andalalin
Dinas Perhubungan Kota Magelang telah mengimplementasikan kebijakan Andalalin sebagai syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Disisi lain terdapat 3 (tiga) indikator yang masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu:

1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik. Pencapaian target indikator ini terkendala karena Pemerintah Kota Magelang sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola terminal angkutan barang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan terminal barang untuk umum menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain masalah kewenangan, lahan terminal angkutan barang Kota Magelang yang ada di Canguk, Kota Magelang saat ini peruntukannya tidak hanya difungsikan untuk terminal angkutan barang, namun juga dimanfaatkan untuk Samsat Cepat Kota Magelang dan Kantor Unit Patwal Polres Magelang Kota sehingga aktifitas di terminal angkutan barang di Canguk, Kota Magelang masih belum maksimal.
2. Jumlah sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata. Keterbatasan lahan dan kecenderungan semakin menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini. Opsi yang bisa ditempuh pada tahun mendatang adalah pembangunan Terminal Tipe C di lahan Gudang DPU Jalan Urip Sumoharjo, Canguk, namun perlu dilaksanakan kajian komprehensif terkait lokasi dan adanya kebijakan eksternal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait rencana pembangunan jalan Flyover Canguk.
3. Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian, karena adanya Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Magelang melakukan pembatasan usia Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di bawah 25 tahun. Dampaknya kendaraan bermotor yang usianya melebihi 25 tahun banyak yang tidak melakukan pengujian.

Ditinjau dari target akhir RPJMD, dari 12 indikator urusan perhubungan, 7 indikator diperkirakan akan tercapai pada akhir RPJMD, 4 indikator lainnya perlu upaya keras dan inovasi agar dapat tercapai, sedangkan 1 indikator diperkirakan tidak akan tercapai sampai akhir periode RPJMD. Satu indikator yang kemungkinan besar tidak akan tercapai sampai akhir periode RPJMD adalah Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata. Sampai dengan tahun 2019, jumlah Sub terminal type C di Kota Magelang baru ada 1 buah yaitu terminal Magersari. Pada tahun 2020 dilaksanakan Studi Kelayakan Pembangunan 1 terminal type C dengan opsi lokasi adalah di daerah Canguk, di bekas gudang penyimpanan DPUPR.

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya:

1. Penyiapan lahan dan pembangunan terminal type C
2. Optimalisasi terminal type C Kota Magelang
3. Meningkatkan layanan uji kendaraan dan perijinan
4. Meningkatkan keselamatan lalu lintas

5. Meningkatkan tata kelola parkir

2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%	90%	100%	111,11%	ST	111,11%	ST	Diskominsta
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:								
		- Radio	60 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	365 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	100%	ST	100%	ST	Diskominsta
		- Media Cetak	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	4 kali/3 agama dan kepercayaan (100%)	50%	SR	50%	SR	Diskominsta
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	ST	200%	ST	Diskominsta
		Cakupan KIM (Jumlah KIM)	100% (17)	100% (17)	123,53% (21)	123,53%	ST	123,53%	ST	Diskominsta
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	7	7	7	100%	ST	100%	ST	Diskominsta
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	0	0	6	600%	ST	600%	ST	Diskominsta
3	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	1	6	600%	ST	600%	ST	Diskominsta
4	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Interoperabilitas antar system informasi	4	4	8	200%	ST	200%	ST	Diskominsta
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	100%	75%	87,50%	116,67%	ST	87,50%	T	Diskominsta
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	100%	80%	100%	125%	ST	100%	ST	Diskominsta
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Diskominsta
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	100%	100%	74%	74%	S	74%	S	Diskominsta

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 12 indikator yang mencapai kinerja Sangat Tinggi (ST) dan hanya 1 indikator dengan kinerja Sangat Rendah (SR), dari total 13 indikator urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak. Pada indikator-indikator yang mencapai kinerja ST, terdapat beberapa indikator yang kinerjanya lebih dari 150%. Komitmen kuat untuk mewujudkan Magelang menuju smart city, melalui sinergi antara berbagai elemen, menjadi faktor pendorong dari capaian tersebut. Beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut adalah:

1. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin. Kerjasama yang sudah terjalin adalah dengan beberapa badan dan lembaga pada beberapa urusan yaitu pendidikan dengan TK Pertiwi, keagamaan dengan Kemenag, pariwisata dengan PD. Kyai Langgeng, perbankan dengan PD. Bank Magelang, Pengadilan Negeri, dan kesehatan dengan RST.
2. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa. Sampai dengan tahun 2018, sudah terdapat kebijakan terkait LPPL, Website, Medsos, PPID, Data Go, dan Majalah sebagai bentuk kontrol terhadap arus informasi media massa di kota Magelang. Termasuk didalamnya adalah Peraturan Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. Indikator ini melebihi target karena adanya 6 kegiatan pemantauan menara telekomunikasi yang menjadi bagian dari penelitian bidang komunikasi dan informasi.

4. Interoperabilitas antar sistem informasi. Banyaknya inovasi dan pengembangan sistem informasi mendorong pemerintah Kota Magelang untuk menginteroperabilitas sistem-sistem informasi yang ada. Interoperabilitas sistem sampai dengan tahun 2019 terdiri dari sektor kependudukan, sektor perhubungan, cctv, SIG, harga pasar, landing page command center, santunan kematian, dan Monggo Lapor.

Meskipun kinerja urusan komunikasi dan informatika secara umum relatif baik namun masih terdapat 1 indikator dengan capaian SR pada tahun 2019 yaitu persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak. Dari target 12 kali terbit yang memuat artikel 5 agama & kepercayaan, pada tahun 2019 hanya mampu tercapai penerbitan sebanyak 4 kali dan baru bisa memuat artikel keagamaan dari 3 agama dan kepercayaan, yaitu Islam, Katolik, dan Kristen Protestan.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, indikator yang memiliki capaian SR adalah persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu upaya keras dalam mencapai target ini.

Untuk mendorong pencapaian indikator ini, sudah dilakukan pendekatan kepada pemuka agama/kepercayaan yang belum ada materi artikel dalam media cetak Pemerintah Kota Magelang. Sedangkan untuk target 12 kali terbit, dapat diupayakan dengan melakukan cetak leaflet atau bulletin terkait artikel keagamaan.

2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Magelang hingga akhir Tahun 2019 yang secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	7%	5%	-12.17%	-243%	SR	-243%	SR	Disperindag
		Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	10%	12.35%	123,5%	ST	123,5%	ST	Disperindag
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (UMKM)	100	100	294	294%	ST	294%	ST	Disperindag
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	7%	4%	42,03%	1050%	ST	600,43%	ST	Disperindag
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	94%	93.60%	93.13%	99%	ST	99%	ST	Disperindag
		Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	40%	30%	29.08%	97%	ST	72,7%	ST	Disperindag
		Jumlah koperasi	235	230	233	101.1%	ST	99,15%	ST	Disperindag
		Jumlah koperasi syariah	24	20	18	90%	T	75%	T	Disperindag

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

Dari keempat program prioritas yang di dalamnya memuat 8 (delapan) indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah, 6 (enam) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan dengan raport capaian tinggi dan sangat tinggi Namun demikian terdapat capaian indicator dengan nilai raport sangat rendah yaitu indikator Presentase peningkatan kualitas pelaku UKM.

Faktor pendorong masing-masing capaian indikator dengan nilai sangat tinggi antara lain:

1. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI
 - a. Dengan pembinaan yang dilakukan secara tepat kepada pelaku KUM maka tumbuh kesadaran para pelaku KUM untuk melengkapi kualitas produksi dengan legal formal yang dibutuhkan supaya lebih mempunyai daya saing produk.
 - b. Meningkatnya kualitas fasilitasi pelayanan penyelenggara urusan Koperasi Usaha Mikro kepada pelaku KUM.
 - c. Regulasi yang mengharuskan setiap produk makanan olahan diwajibkan untuk memiliki sertifikat Halal
2. Jumlah wirausaha baru (UMKM)
 - a. Kemudahan pengurusan ijin berusaha melalui OSS (*Online Single Submission*)

- b. Pelatihan–pelatihan yang diselenggarakan oleh disnaker melalui BLK
3. Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan
 - a. Program Kredit Usaha Mikro (KUR) Pemerintah melalui perbankan maupun pegadaian dengan program UMMI

Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM dengan capaian indikator nilai sangat rendah dipengaruhi oleh antara lain:

1. ketersediaan data yang kurang valid
2. kurang efektifnya pendamping di setiap kelurahan dalam melakukan pendataan
3. asumsi bahwa banyak pelaku usaha yang berpindah profesi, meninggal dunia dan pindah domisili.

Dari delapan indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Dari 4 indikator, 3 indikator capaian kinerjanya perlu perhatian serius walaupun capainnya sangat tinggi yaitu prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP, jumlah koperasi dan jumlah koperasi syariah. Indikator tersebut erat kaitannya dengan (a) keterbatasan jumlah SDM yang tersedia dalam penyelenggaraan urusan ini, dan (b) pengawasan terhadap koperasi yang telah ada untuk tetap beroperasi sesuai dengan AD/ART Koperasi masih lemah.
2. Sarana promosi produk yang mendukung identitas Kota Magelang belum tersedia dengan layak.
3. Masih terbatasnya kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan penguasaan teknologi.
4. SDM pengelola koperasi kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas serta kerja sama antar anggota yang kurang terjalin dengan baik.

Dari 8 indikator urusan koperasi dan usaha menengah, 7 diantaranya diperkirakan akan dapat tercapai sampai akhir periode RPJMD, sedangkan 1 indikator lainnya perlu upaya keras untuk dapat mencapai target yaitu persentase peningkatan kualitas pelaku UKM.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Pendampingan dan fasilitasi Koperasi, Usaha Kecil Menengah
2. Koperasi, Usaha Kecil Menengah naik kelas agar lebih berdaya saing
3. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
4. Meningkatkan sarana promosi produk yang mendukung identitas Kota Magelang.
5. Meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan penguasaan teknologi.
6. Meningkatkan kualitas dan etos kerja SDM pengelola koperasi.

2.12 Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan Penanaman Modal melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	4	4	100%	ST	100%	ST	DPMPTSP
2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	10%	16,99%	169,9%	ST	113,3%	ST	DPMPTSP
		Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	23,2%	154,67%	ST	154,67%	ST	DPMPTSP
		Jumlah investor baru	200	172	319	185%	ST	159,5%	ST	DPMPTSP

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, dari 2 (dua) program utama dengan 4 (empat) indikator, capaian kinerjanya semuanya sangat tinggi.

Untuk indikator jumlah kerjasama pemerintah dan investor dari target yang ditetapkan 4 kerjasama, sudah terjalin 4 kerjasama sehingga indikator ini telah tercapai. Adapun kerjasama yang terjalin sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2017 telah terjalin kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk Nomor 062/BTS-DIR/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang penyelenggaraan telekomunikasi diatas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Magelang dengan konsep Jaringan Base Transceiver Station (BTS) microcell dan fiber optic.
2. Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara DPMPTSP Kota Magelang dengan A&J advertising nomor: 510.72/02/330/2017 tanggal 12 juni 2017 tentang penyelenggaraan reklame billboard an M.A. Azis dan Rusdiyanto.
3. Pada Tahun 2018 terajlin Perjanjian kerjasama antara DPMPTSP Kota Magelang dengan PT Distrindo Jaya nomor 510.72/28/330/2018 tanggal 8 maret 2018 tentang penyelenggaraan reklame bando jalan A.Yani (depan RSI) atas nama M.A Azis,SH dan Yovan Wihartanto.
4. Pada Tahun 2019 telah disepakati perjanjian kerjasama antara DPMPTSP Kota Magelang dengan Persekutuan Komanditer "Mikro Computer" Kota Magelang nomor 510.72/04/330/2019 tanggal 5 september 2019 tentang penyelenggaraan reklame billboard atas nama M.A Azis,SH dan H. Hanjojo W.

Jumlah kerjasama tersebut didominasi oleh investasi pelayanan jasa, namun demikian Pemerintah Kota Magelang tetap terus berupaya untuk mendatangkan investor pada sektor yang lain. Pada akhir Tahun 2019, dalam upaya menggandeng investor dalam pembangunan, Pemerintah Kota Magelang melakukan lelang investasi pembangunan secara Bangun Serah Guna pada lahan Pemerintah Kota Magelang Hak Pakai No. 1 yang berlokasi di bekas Magelang Theater, yang pada akhir tahun 2019 masih dalam proses evaluasi calon investor.

Kinerja indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2019 mencapai Rp. 226.756.134.640,00, meningkat 16,99% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 193.821.000.000,00. Namun demikian data tersebut masih perlu dikoordinasikan dengan BKPM Pusat karena kewajiban pelaporan investasi asing yang masuk suatu wilayah kabupaten kota harus dilaporkan secara langsung oleh investor ke BKM Pusat. Investor tidak memiliki keharusan melaporkan ke DPMPTSP kabupaten/Kota.

Untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMDN terlihat menunjukkan nilai yang signifikan, dari target 15% pada Tahun 2019 telah tercapai melampaui sebesar 23,2%. Capaian kinerja indicator pertumbuhan nilai investasi PMDN berkorelasi dengan indikator jumlah investor baru yang mencapai 319 investor, jauh melampaui target 2019 sebanyak 172 investor, bahkan juga telah melampaui target yang ditetapkan sampai Tahun 2021 sebanyak 200 investor. Terlampauinya target kedua indikator ini mengindikasikan iklim usaha yang sangat baik di Kota Magelang yang menyebabkan banyaknya bermunculan usaha baru khususnya pada pelaku usaha skala kecil, dan ditunjang dengan adanya pelayanan perijinan OSS (*Online Single Submission*) yang semakin memudahkan dunia usaha dalam memperoleh perijinan dalam berusaha. Investasi PMDN di Kota Magelang didominasi Investor yang langsung menyewa kepada pihak swasta atau masyarakat karena lebih murah, disamping itu investor juga lebih tertarik berusaha dengan membeli langsung pada tanah persil milik masyarakat atau swasta.

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP dalam urusan penanaman modal yaitu ikut serta secara aktif mengikuti acara dengan mitra kerja antara lain:

1. ikut berpartisipasi dalam forum *Central Java Potential Investment Challenge* (CJPIC) Jateng yang disponsori oleh BI (Bank Indonesia) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan promosi investasi kota magelang.
2. ikut berpartisipasi dalam *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF) Provinsi Jawa Tengah
3. bekerjasama dengan KADIN Kota Magelang serta pengusaha dalam kota maupun luar Kota Magelang menyelenggarakan acara MASSIF (*Magelang Business and Investment Forum*) untuk memaparkan profil investasi yang dimiliki Kota Magelang.

Dihadapkan pada target akhir periode RPJMD, semua target urusan penanaman modal diperkirakan akan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD mengingat kinerjanya saat ini sangat tinggi, bahkan sebagian besar sudah melampaui target akhir RPJMD.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penanaman modal pada tahun 2021:

1. Meningkatkan pelayanan perijinan melalui Mall Pelayanan Publik
2. Mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi
3. Memverifikasi profil investasi daerah dan obyek-obyek investasi yang memang benar-benar layak yang benar-benar *clean and clear* meningkatkan ketertarikan investor untuk berinvestasi di daerah.

2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	7	6	10	166,67%	ST	142,86%	ST	Disporapar
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional								
		- Peringkat di POPDA SD	3	5	22	turun	R	turun	R	Disporapar
		- Peringkat di POPDA SMP	9	13	27	turun	R	turun	R	Disporapar
		- Peringkat di POPDA SMA	16	19	23	turun	R	turun	R	Disporapar
		- Peringkat di Dulongmas	NA	2	-	-	NA	-	NA	Disporapar
		- Peringkat di PORPROV	NA	-	-	-	NA	-	NA	Disporapar
		Jumlah klub olah raga	183	183	183	100%	ST	100%	ST	Disporapar
Jumlah organisasi olah raga	36	35	37	105,71%	ST	102,78%	ST	Disporapar		
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91,18%	85%	100%	117,65%	ST	109,67%	ST	Disporapar
		Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional								
		a. Propinsi	8	7	3	100%	ST	100%	ST	Disporapar
	b. Nasional	1	1	1	100%	ST	100%	ST	Disporapar	
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi	98,00%	96%	72,5%	75,52%	T	73,98%	S	Disporapar
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	1	0	0%	SR	0%	SR	Disporapar
		Persentase pengangguran pemuda	5,37%	6,15%	5,37%	87,32%	T	100%	ST	Disporapar
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	5	5	2	40%	SR	40%	SR	Disporapar
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	89%	77%	81,75%	106,17%	ST	91,85%	ST	Disporapar
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	75%	0	0%	SR	0%	SR	Disporapar
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,81%	-	-	NA	-	NA	Disporapar

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan, terdapat sebanyak 8 indikator memperoleh predikat sangat tinggi, 2 indikator dengan predikat tinggi, 3 indikator dengan predikat rendah, 4 indikator terkatagori sangat rendah dan 1 indikator tidak dapat diukur. Indikator yang perlu mendapat perhatian serius dan memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya karena terkatagori rendah/sangat rendah antara lain indikator jumlah pemuda pelopor yang berprestasi, persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi, dan persentase kelompok wirausaha pemuda.

Rendahnya indikator jumlah pemuda pelapor berprestasi dan kewirausahaan pemuda di Kota Magelang pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan keberhasilan indikator persentase organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi, karena pada dasarnya dari organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Lemahnya capaian jumlah pemuda pelopor berprestasi dapat dianalogikan sebagai belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda yang selama ini dilaksanakan, sehingga kedepan diperlukan upaya-upaya konstruktif terhadap model pembinaan dan fasilitasi yang selama ini dilaksanakan agar kedepan dapat menghasilkan sistem pembinaan yang terarah, terpadu, efektif dan mampu menjawab tantangan dinamika perkembangan jaman sehingga dapat menciptakan kesadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

Disamping hal tersebut beberapa faktor yang dimungkinkan berkontribusi dan berkorelasi terhadap rendahnya capaian urusan kepemudaan dan kedepan perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi.
2. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.
3. Jiwa kewirausahaan dan daya saing di kalangan pemuda masih rendah, disatu sisi akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan.
4. Belum adanya data potensi pemuda secara rigit dan detail, sehingga saat ini masih sulit dilakukan pemetaan kondisi pemuda di Kota Magelang.
5. Masih belum adanya kesamaan gerak dalam tubuh organisasi dan diri pemuda, yang seharusnya dapat disatukan melalui organisasi besar mereka yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia.
6. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas antar sektor OPD dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
7. Masih perlunya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda.

Terkait dengan sangat rendahnya capaian kinerja indikator prosentase lapangan olahraga yang direvitalisasi pada tahun 2019 sebesar 40% pada dasarnya banyak terkendala pada masalah kewenangan perangkat daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan revitalisasi. Semula telah dianggarkan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata namun karena lapangan olahraga yang akan direvitalisasi tersebut merupakan aset dari Kecamatan/Kelurahan maka terjadi pembatalan pelaksanaan, sehingga kedepan diperlukan penegasan pelaksana kegiatan revitalisasi yaitu perangkat daerah yang mencatat kepemilikan lahan lapangan olahraga tersebut.

Adapun 3 indikator dengan predikat rendah dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diperoleh dari indikator peningkatan prestasi atlet di tingkat regional olahraga POPDA SD, SMP, dan SMA. Rendahnya pencapaian prestasi/peringkat atlet Kota Magelang pada ajang POPDA SD, SMP, dan SMA selain dikarenakan makin ketatnya persaingan antar daerah juga mengindikasikan belum optimalnya sistem pembinaan atlit olahraga di Kota Magelang. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tersebut meliputi beberapa aspek baik terkait ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan, disamping adanya regulasi daerah sebagai landasan sistem pembinaan dan sistem pembibitan olahraga daerah. Sedangkan indikator yang tidak dapat diukur dikarenakan tidak ditetapkannya target adalah peringkat di Dulongmas yang merupakan salah satu event kompetisi rutin yang diselenggarakan atau lebih dikenal dengan Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) Wilayah Kedu, Pekalongan dan Banyumas serta indikator peringkat di PORPROV.

Sedangkan kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD masih menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya beberapa indikator dengan capaian rendah dan sangat rendah. Indikator terkatagori rendah antara lain peringkat pada POPDA SD, SMP dan SMA, sedangkan indikator dengan status sangat rendah antara lain indikator jumlah pemuda pelopor yang berprestasi, persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi, dan indikator persentase kelompok wirausaha pemuda. Kedepan di masa akhir RPJMD 2021 sangatlah diperlukan upaya-upaya akselerasi guna percepatan pencapaian indikator diatas, dan menjadikan indikator-indikator tersebut menjadi prioritas.

2.14 Statistik

Kinerja Urusan Statistik di Kota Magelang hingga tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	Persentase pemenuhan data statistik	95%	95%	99,14%	104,36%	ST	104,36%	ST	Diskominsta

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019

Kinerja Urusan Statistik sudah baik, dengan status capaian ST. Dari target 2019 yaitu persentase pemenuhan data statistik sebesar 95% sudah tercapai 99,14%. Dari jumlah publikasi data yang dibutuhkan sejumlah 347, sudah terpenuhi sebanyak 344 data sektoral. Data yang belum dapat dipenuhi yaitu Luas wilayah ber-HPL dan HGB, nilai impor, serta jumlah izin usaha mikro kecil.

Kinerja urusan statistik memiliki status ST, sama dengan kinerja terhadap target tahun 2019. Kondisi ini dipastikan dapat tercapai sampai dengan akhir periode RPJMD.

2.15 Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 program dengan 3 indikator kinerja. Kinerja Urusan Persandian tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan SOP persandian	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Diskominsta
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	100%	50%	50%	SR	50%	SR	Diskominsta
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	100%	100%	3,45%	3,45%	SR	3,45%	SR	Diskominsta

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2020

Dari 3 indikator yang ada, 1 indikator sudah berkinerja ST sedangkan 2 indikator lainnya masih berkinerja SR. Indikator dengan kinerja SR ini perlu mendapat perhatian demi tercapainya target kinerja di akhir periode RPJMD. Indikator dengan kinerja SR yaitu indikator Tingkat kapasitas SDM persandian dan Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian. Kondisi ini dikarenakan oleh beberapa kendala seperti:

1. Tingkat kapasitas SDM persandian dengan capaian 50%. Kondisi ini dikarenakan dari total kebutuhan 2 sandiman, tetapi baru tercukupi 1 sandiman.
2. Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian. Indikator ini sulit dicapai karena hanya 1 OPD yang menerapkan SOP Persandian. Hal ini terjadi karena SOP Persandian yang bersifat rahasia.

Kinerja indikator dibandingkan dengan target RPJMD, memiliki status kinerja yang sama dengan status kinerja terhadap target 2019. Tingkat kapasitas SDM persandian dan Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target akhir periode RPJMD.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengejar capaian target capaian indikator yang masih sangat rendah diantaranya:

1. Tingkat kapasitas SDM persandian akan dilakukan upaya pengikutsertaan ASN pada diklat sandiman
2. Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian tidak dapat dilakukan intervensi karena memang SOP persandian tidak dapat diterapkan di semua OPD.

2.16 Kebudayaan

Urusan Kebudayaan terdiri dari 4 program dengan 15 indikator kinerja. Kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	41,67%	41,67%	SR	41,67%	SR	Disdikbud
		Jumlah pengunjung museum	5.600	5.350	7.329	136,99%	ST	130,86%	ST	Disdikbud
		Jumlah koleksi museum	15	13	65	500%	ST	433,33%	ST	Disdikbud

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	16,67%	15,77%	40,18%	254,79%	ST	241,03%	ST	Disdikbud
		Jumlah festival seni dan budaya.	14	13	36	276,92%	ST	257,14%	ST	Disdikbud
		Cakupan gelar seni 75%	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	230	227	290	127,75%	ST	126,09%	ST	Disdikbud
		Misi kesenian 100%	50%	43%	100%	232,56%	ST	200%	ST	Disdikbud
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah gedung kesenian	2	1	1	100%	ST	50%	R	Disdikbud
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15	13	11	84,62%	T	73,33%	S	Disdikbud
		Cakupan kajian seni 50%	80%	77%	73,33%	95,23%	ST	91,66%	ST	Disdikbud
		Cakupan fasilitas seni 30%	45%	39%	71,43%	183,15%	ST	158,73%	ST	Disdikbud
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	80%	79%	100%	126,58%	ST	125%	ST	Disdikbud
		Cakupan tempat 100%	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disdikbud
		Cakupan organisasi 34%	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disdikbud

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2019

Berdasarkan tabel capaian indikator program unggulan tersebut, dari 12 indikator masih terdapat 1 indikator dengan status capaian SR yaitu Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Sedangkan indikator lainnya memiliki status capaian ST dan 1 indikator dengan capaian T. Dalam capaian kerjanya, terdapat 4 indikator yang memiliki capaian lebih dari 150% yaitu Jumlah koleksi museum, Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan, Jumlah festival seni dan budaya, Misi kesenian, dan Cakupan fasilitas seni. Kondisi ini didukung oleh faktor pendorong seperti:

1. Jumlah koleksi museum. Jumlah koleksi museum yang capaiannya melebihi target disebabkan oleh penambahan koleksi berupa lukisan di Museum Sudirman.
2. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan. Hal ini didorong oleh adanya dorongan event kesenian dan kebudayaan, salah satunya adalah sadranan, yang mendorong keikutsertaan kelompok kesenian dan kebudayaan untuk terus berkembang.
3. Jumlah festival seni dan budaya. Tingginya capaian indikator ini didorong oleh beragamnya event-event seni dan budaya yang diadakan di Kota Magelang.
4. Misi kesenian. Indikator ini memiliki kinerja lebih dari 100% karena seluruh misi kesenian dilaksanakan oleh pemerintah kota, sementara target hanya 1 misi kesenian sehingga kinerja indikator ini menjadi sangat tinggi
5. Cakupan fasilitas seni. Fasilitas seni yang dilaksanakan sudah melebihi target tahun 2019 karena ada banyak event kesenian yang dilaksanakan dan diikuti oleh kelompok-kelompok seni.

Disamping indikator yang kerjanya lebih dari 150%, terdapat 1 indikator dengan kinerja SR yaitu Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah adanya ketidaksinkronan data. Pada tahun 2018, terdapat 10 cagar budaya yang ditetapkan, dan tahun 2019 terdapat penetapan lagi sejumlah 10 cagar budaya. Sehingga sampai tahun 2019, baru ada 20 cagar budaya dari total 48 cagar budaya hasil identifikasi cagar budaya yang terbaru.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, terdapat 1 indikator dengan status SR yaitu Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dan 1 indikator dengan status R yaitu Jumlah gedung kesenian. Kedua indikator ini memerlukan upaya keras untuk mewujudkan target akhir periode RPJMD tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong indikator kinerja yang masih kurang yaitu dengan terus melakukan identifikasi dan kajian dalam rangka penetapan cagar budaya. Kajian terkait ini tentunya akan terus dilaksanakan dan diperluas sehingga penambahan penetapan cagar budaya dapat bertambah setiap tahunnya.

2.17 Perpustakaan

Indikator kinerja urusan perpustakaan melibatkan 6 (enam) indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd target 2019		Thd target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Persentase peningkatan judul buku	15,99%	9,28 %	23,58%	254,09%	ST	147,46%	ST	Disperpusip
		Persentase peningkatan jumlah buku	9,89%	6,26 %	28,44%	454,31%	ST	287,56%	ST	Disperpusip
		Persentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompoten	66,35%	56,87 %	56,82%	99,91%	ST	85,63%	ST	Disperpusip
		Persentase perpustakaan aktif	28,44%	23,70 %	24,05%	101,48%	ST	84,56%	T	Disperpusip
		Cakupan pelayanan melalui e-library	5 %	3%	11,11%	370,33%	ST	222,2%	ST	Disperpusip
		Peningkatan promosi layanan perpustakaan	25 %	16,67%	127,27%	763,47%	ST	509,08%	ST	Disperpusip

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2019

Dari keenam indikator kinerja urusan perpustakaan, semua indikator sebanyak 6 (enam) indikator yang capaiannya sangat tinggi sekali.

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan terdapat indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu:

1. Persentase peningkatan judul buku sebesar 254,09% hal ini disebabkan karena DO yang digunakan saat ini dihitung dengan n-1, seharusnya dihitung dengan tahun dasar 2015. Selain itu karena targetnya memang terlalu rendah dan adanya sumbangan buku dari beberapa pihak yang tidak diperhitungkan sebelumnya.
2. Persentase peningkatan jumlah buku sebesar 454,31% hal ini disebabkan karena pihak perpustakaan daerah Kota Magelang mendapat sumbangan buku dari provinsi, masyarakat, perpustakaan nasional maupun penerbit sehingga tidak hanya dari pengadaan yang bersumber APBD, hal ini juga merupakan strategi untuk mendukung Kota Jasa di bidang Pendidikan sehingga ada komitmen untuk penambahan jumlah dan judul buku yang ada di Perpustakaan.
3. Cakupan pelayanan melalui e-library sebesar 370,33%, hal ini disebabkan faktor pembilang hanya satu yaitu layanan elektronik dan faktor penyebut yang merupakan total layanan selalu bertambah. Selain itu dengan adanya program Smart City dan di era digital maka penerapan mutu layanan perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan pemakai dengan pelayanan di bidang e-library yang juga mendukung layanan informasi berbasis teknologi.
4. Peningkatan promosi layanan perpustakaan sebesar 763,47%, yang disebabkan oleh tidak tentunya event yang di selenggarakan oleh perpustakaan. Pada tahun 2019 terdapat 25 event yang tahun sebelumnya hanya ada 11 event. Banyak nya event juga dipengaruhi dengan Magelang sebagai Kota Jasa maka event bidang pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung

Dalam pencapaian terhadap akhir tahun periode RPJMD urusan perpustakaan ini diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD dengan merujuk pada hasil evaluasi yang ada di urusan ini dari 6 (enam) indikator terdapat 5 (lima) indikator dengan kategori ST dan 1 (satu) indikator dengan kategori T.

2.18 Kearsipan

Indikator kinerja urusan kearsipan melibatkan 8 (delapan) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana prasarana arsip yang terpelihara	89%	79%	100%	126,58%	ST	112,35%	ST	Disperpusip
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan pelayanan akses arsip	82%	78%	97,58%	125,1%	ST	119%	ST	Disperpusip
		Tingkat kompetensi SDM pengelola kearsipan	67%	45%	70,42%	156,49%	ST	105,1%	ST	Disperpusip
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase OPD yang telah menerapkan arsip baku	100%	69%	72,41%	104,94%	ST	72,41%	S	Disperpusip

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
		Persentase arsip dan risalah	85%	82%	NA	NA	NA	NA	NA	Disperpusip
		Persentase penyelamatan arsip	73%	60%	60,31%	100,52%	ST	82,61%	T	Disperpusip
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase implementasi e-arsip	100%	69%	69,09%	100,13%	ST	69,09%	S	Disperpusip
		Persentase ketersediaan sarpras arsip	60%	40%	30%	75%	S	50%	SR	Disperpusip

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2020

Dari kedelapan indikator kinerja urusan kearsipan, terdapat 6 (enam) indikator yang capaiannya sangat tinggi sekali, 1 (satu) sedang dan 1 (satu) indikator yang tidak dapat diperhitungkan mengingat lemahnya koordinasi antar perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap capaian target indikator persentase arsip dan risalah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera dikoordinasikan untuk disolusikan antara perangkat daerah pengampu urusan kearsipan dan perangkat daerah yang mendokumentasikan risalah, dan atau diperlukan dengan kejelasan tentang definisi operasional yang dimaksud dengan risalah tersebut.

Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan, terdapat indikator yang kerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu Tingkat kompetensi SDM pengelola kearsipan. Faktor pendorong nya adalah pada tahun 2019 ini terdapat 142 pengelola arsip yang terdiri dari 29 OPD, 84 sekolah, 17 kelurahan, 4 BUMD dan 8 satker. Dan ada 84 yang kompeten yang terdapat di pengelola arsip di sekolah. Selain itu adanya peningkatan materi dan kompetensi dalam pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Disperpusip.

Dalam pencapaian terhadap akhir tahun periode RPJMD maka urusan kearsipan ini diperkirakan sebagian besar dapat tercapai pada akhir periode RPJMD dengan merujuk pada hasil evaluasi yang ada di urusan ini dari 8 (delapan) indikator terdapat 4 (empat) indikator dengan kategori ST dan T dan 2 (dua) indikator dengan kategori S yang membutuhkan upaya untuk pencapaian target akhir periode dana dan 1 (satu) indikator dengan kategori SR yaitu persentase ketersediaan sarpras arsip hal ini berkaitan langsung dengan pengadaan roll-o-pack, jadi indikator ini sangat bergantung kepada ketersediaan anggaran.

3 URUSAN PILIHAN

3.1 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan indikator kinerja urusan yang melibatkan 6 (enam) indikator dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

NO	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP	100	100	100	100%	ST	100%	ST	Disperpa
		Jumlah pengolahan ikan yang telah melaksanakan prinsip dasar pengolahan yang benar	6	4	4	100%	ST	66,67%	S	Disperpa
2.	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi hasil perikanan Produksi ikan	167,83 ton	164,02	164,02	100%	ST	97,73%	ST	Disperpa
		Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CPIB	70%	50%	0	0	SR	0	SR	Disperpa
		Persentase unit pembudidayaan ikan bersertifikasi CBIB	70%	50%	85,71%	171,42	ST	122,42	ST	Disperpa
3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Luas lahan perikanan organik	0,6	0,40	0,30	75	S	50	R	Disperpa

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2020

Dari keenam indikator kinerja urusan Perikanan dan Kelautan terdapat indikator, 4 (empat) indikator capaiannya Sangat Tinggi (ST), 1 (satu) indikator capainya Sedang (S), sedangkan 2 (dua) indikator lainnya capaiannya Sangat Rendah (SR)/ tidak tercapai. Indikator yang kerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu Persentase unit pembudidayaan ikan CBIB yang telah bersertifikasi dengan capaian yang sangat tinggi melebihi target yaitu 171,43%.

Terlampainya target indikator ini karena dukungan pelaku usaha dibidang perikanan dengan adanya penambahan pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi dari pelaku binaan.

Disisi lain terdapat indikator yang masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan dengan capaian Sangat Rendah (SR) yaitu Presentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB, masih 0% disebabkan Balai Benih Ikan (BBI) di Bojong sarana prasarannya kurang memadai dan tidak memenuhi syarat untuk disertifikasi CPIB karena terkena proyek TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bojong yang menjadikan BBI tidak bisa operasional. Sedangkan tidak tercapainya luas lahan perikanan organik disebabkan semakin berkurangnya lahan perikanan karena berubah fungsi menjadi lahan terbangun. Diantara lahan yang tersisa, tidak semua dapat dipergunakan untuk perikanan organik. Perikanan organik memerlukan perlakuan khusus karena merupakan perikanan ramah lingkungan, yaitu dari proses produksi yang tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya dan merusak lingkungan hingga menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD, dari 6 indikator urusan kelautan dan perikanan, 3 indikator diperkirakan akan tercapai, 1 indikator perlu upaya untuk pencapaiannya, sedangkan 2 indikator lainnya perlu upaya keras dan inovatif untuk dapat mencapai target sampai dengan akhir periode RPJMD. Kedua indikator yang perlu upaya keras dan inovatif tersebut adalah persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CPIB dan luas lahan perikanan organik.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk urusan kelautan dan perikanan adalah:

1. Optimalisasi sawah dan kolam untuk budidaya ikan
2. Pengembangan budidaya perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi mengingat keterbatasan dan semakin berkurangnya lahan untuk budidaya perikanan
3. Meningkatkan sarana prasarana Balai Benih Ikan
4. Pengembangan perikanan organik.

3.2 Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui tiga program dengan tujuh indikator seperti di bawah ini:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Th. 2019				PD Penganggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Wisata Unggulan	7	5	5	100%	ST	71	S	Disporapar
		Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	88,89%	66,67%	72,73%	109,01%	ST	81,82%	T	Disporapar
2	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	13	11	11	100%	ST	84,62%	T	Disporapar
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 HARI	2-4 Hari	1-2 Hari	50%	SR	50%	SR	Disporapar
		Persentase TIC yang representatif	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disporapar
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.143.954	1.138.140	1.350.821	118,69%	ST	118,08%	ST	Disporapar
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.219	5.192	10.740	206,8%	ST	205,79%	ST	Disporapar

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2020

Secara keseluruhan dari data yang tersaji diatas menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan capaian kinerja urusan Pariwisata pada tahun 2019 terkategori cukup baik, hal tersebut ditandai dari 7 indikator yang ada terdapat 6 indikator memperoleh predikat capaian sangat tinggi dan 1 indikator sangat rendah. Indikator sangat rendah diperoleh dari indikator lama kunjungan wisatawan yang merupakan gambaran jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan di Kota Magelang. Faktor lama tinggal wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan atau devisa. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka

semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. Data capaian lama kunjungan wisatawan di Kota Magelang sebanyak 1-2 hari, atau masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2-4 hari, mengingat Kota Magelang merupakan kota transit. Disamping hal tersebut faktor yang mempengaruhi lama kunjungan wisatawan sangat berkorelasi dengan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata yang ada di Kota Magelang. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk dan jasa pariwisata yang ditandai belum adanya paket-paket wisata yang menjual produk wisata Kota Magelang, serta masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata sangat berpengaruh terhadap angka lama kunjungan wisatawan.

Berkaitan dengan hal tersebut upaya kedepan yang harus diperhatikan guna peningkatan lama kunjungan wisata di Kota Magelang antara lain:

1. Pengembangan daya tarik wisata baik secara kuantitas dan kualitas agar meminimalisir potensi titik jenuh bagi wisatawan, dalam hal ini konsep melalui pengembangan destinasi wisata budaya, dan buatan melalui pengembangan wisata kuliner, pengembangan wisata sejarah dan religi, pengembangan wisata tradisi dan seni budaya.
2. Pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan kelembagaan pengelola destinasi, penguatan kelompok sadar wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, serta internalisasi sadar wisata dan sapta pesona, disamping upaya peningkatan kemitraan dengan industri pariwisata.
3. Pengembangan strategi pemasaran pariwisata yang terfokus melalui promosi, branding, dan penciptaan event-event wisata.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, semua indikator urusan kepariwisataan ini sudah memiliki status capaian relatif tinggi. Kondisi ini diharapkan terus terjaga sehingga target tersebut dapat tercapai.

3.3 Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian diukur melalui 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang masuk dalam 10 program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	
1	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentasi unit usaha yang telah bersertifikasi NKV	4,24%	3,03	3,03	100 %	ST	71,42%	S	Disperpa
2	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan	Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	52,94%	23,53%	25,19%	107%	ST	47,58%	R	Disperpa
		Rasio petani terlatih	90%	90%	92%	102,16%	ST	102,16%	ST	Disperpa
3	Program pencegahan dan penanggulangan	Prosentase hewan sehat	87%	85%	87%	102,94%	ST	100%	ST	Disperpa
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	6	8	133,3%	ST	100%	ST	Disperpa
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10%	6%	7,5 %	125%	ST	75%	T	Disperpa
		Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	13	13	13	100%	ST	100%	ST	Disperpa
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal	4,24%	3,03%	3,03%	100%	ST	71,46%	S	Disperpa
7	Program penerapan peningkatan teknologi pertanian dan perkebunan	Luas Lahan Pertanian Organik	1,14	1,03%	1,03%	100%	ST	90%	T	Disperpa
		Prosentase petani yang telah menerapkan teknologi pertanian	72%	60%	80%	144 %	ST	111,11%	ST	Disperpa
8	Program peningkatan penerapan teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Peternakan Organik	15	9	9	100%	ST	60%	S	Disperpa
		Rasio peternak terlatih	90%	85	88	104%	ST	97,78%	ST	Disperpa
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Daging Ruminansia	1.401.690	1.289.554.	1.208.830	94%	T	86,24%	T	Disperpa
		Daging Unggas	5.660.315	5.610.449	7.515.234.	124%	ST	132,77%	ST	Disperpa
		Telur	50.000	46.000	61.626	134%	ST	123,25%	ST	Disperpa
		Susu	209.000	214.945	201.400	94%	T	96,36%	T	Disperpa
10	Program Peningkatan Produksi	Padi	3.120	3.160	2.440,24	78%	T	78 %	T	Disperpa
		Jagung	11	11	23	209%	ST	209%	ST	Disperpa

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja RKPd Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	
		Ubi Kayu	13,50	15,80	13,50	85,44%	T	100%	ST	Disperpa

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2019

Dari ke-10 Program prioritas dalam urusan pertanian yang memuat 19 indikator kinerja, terdapat 15 (lima belas) indikator dengan capaian Sangat Tinggi (ST), dan 4 (empat) indikator capaiannya Tinggi (T). Dalam penyelenggaraan urusan pertanian terdapat 1 (satu) indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu: Jumlah produksi jagung, dari target produksi sebesar 11 Ton pada Tahun 2019 tercapai jauh melampaui target sebesar 23 Ton, atau mencapai 209%.

Tercapainya produksi jagung yang jauh melampaui target bahkan sampai 2 kali lipat disebabkan masa tanam jagung pada tahun 2019 diadakan dua kali dalam kurun waktu setahun, sedangkan pada tahun sebelumnya (2018) masa tanam hanya dilakukan satu kali. Terlampauinya produksi jagung juga disebabkan adanya penambahan luas lahan untuk tanam jagung. Sehingga ada peningkatan produksi yang sangat sangat tinggi. Disamping itu produksi jagung dapat berhasil melampaui target karena adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Magelang dalam hal Dinas Pertanian dan Pangan dengan petani jagung. Dinas Pertanian dan Pangan secara rutin juga melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan serta memberikan pengarahan/pembinaan dikelompok petani.

Dihadapkan dengan target akhir RPJMD, dari 19 indikator, 15 indikator diperkirakan akan dapat tercapai, 3 indikator perlu upaya untuk mencapai target akhir, sedangkan 1 indikator perlu upaya keras dan inovatif untuk dapat mencapai target akhir yaitu prosentase petani yang melaksanakan GAP.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan pertanian terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Pengembangan pertanian organik
2. Pengembangan peternakan organik
3. Pengembangan urban farming
4. Optimalisasi lahan sempit
5. Meningkatkan nilai ekonomi usaha pertanian dan peternakan

3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melibatkan 1 (satu) indikator kinerja daerah dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	
1.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU)	71,89%	67%	64,61%	96,43%	ST	89,97%	ST	DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2019

Indikator urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang termasuk dalam program pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan yaitu rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU) capaian kinerjanya sangat tinggi (ST), dengan capaian 96.43 %. Dari jumlah KK yang memerlukan Penerangan Jalan Umum yaitu sekitar 8.731, telah terpenuhi jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 5.641.

Permintaan masyarakat terhadap pemasangan lampu PJU melalui proses musrenbang dari tahun ke tahun cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Pertamanan DLH (2019) terdapat 340 permintaan titik pemasangan PJU dari masyarakat, namun hanya 44 titik per tahun yang bisa direalisasikan, karena keterbatasan anggaran dan permasalahan teknis. Oleh karena timpangnya permintaan dan kesanggupan pemasangan PJU ini, maka di beberapa wilayah ada masyarakat yang memasang lampu penerangan jalan secara swadaya, tetapi daya listriknya disambungkan secara ilegal ke PJU terdekat.

Dihadapkan dengan target akhir periode RPJMD, indikator urusan energi dan sumber daya mineral yaitu rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum diperkirakan akan dapat tercapai.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan energy dan sumber daya mineral pada tahun 2021 adalah:

1. Pemenuhan PJU bagi masyarakat
2. Pengembangan energy alternative/ terbarukan untuk PJU

3.5 Perdagangan

Indikator kinerja urusan Perdagangan melibatkan 6 (enam) program prioritas dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan PKL yang dibina	16%	12%	76,16%	635%	ST	476%	ST	Disperindag
		Jumlah shelter PKL yang dikelola	17	14	19	136%	ST	111,76	ST	Disperindag
2	Program Pengelolaan Pasar	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	54 %	23%	-92,31%	-401%	SR	-170,94	SR	Disperindag
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10 %	10 %	23,21%	232,1%	ST	232,1%	ST	Disperindag
		Cakupan pedagang pasar yang dibina	16 %	12 %	18,93%	157,75%	ST	118,31%	ST	Disperindag
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	80 %	80 %	80 %	100%	ST	100%	ST	Disperindag
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor produk ke LN	US\$ 1.250.000	US\$ 1.150.000	US\$ 2.308.905,97	200,77%	ST	184,71%	ST	Disperindag
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	7 %	5 %	20,81%	416,2%	ST	297,29%	ST	Disperindag
5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTP yang ditera	3.100	2.900	7.921	273%	ST	255,52%	ST	Disperindag
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design	60 %	60 %	40%	66,66%	S	66,66%	S	Disperindag

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

Dari keenam program prioritas yang di dalamnya memuat 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan Perdagangan, 8 (delapan) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan dengan capaian kerjanya sangat tinggi. sedangkan 1 (satu) indikator capaiannya sangat rendah yaitu persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar dan 1 (satu) indikator Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design dengan capaian sedang.

Dari tabel diatas nampak terdapat 8 (delapan) indikator yang telah mencapai nilai sangat tinggi, hal ini tidak lepas dari beberapa faktor pendorong antara lain:

1. Cakupan PKL yang dibina secara rutin dilakukan baik langsung kepada PKL maupun kepada paguban PKL sehingga meningkatkan cakupan pembinaan tersebut.
2. Jumlah shelter PKL yang dikelola dan terbangun yang ditargetkan pada akhir periode RPJMD adalah 17 shelter PKL namun pada tahun ini telah terbangun dan dikelola berjumlah 19 shelter PKL
3. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional pada tahun 2018 sebesar 2.520 M³ meningkat pada tahun 2019 menjadi 3.105 M³ tidak lepas dari intensifikasi pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk cair di pasar Rejowinangun.
4. Cakupan pedagang pasar yang dibina secara rutin dilakukan kepada pedagang dengan dukungan OPD lain semisal dinas kesehatan ikut serta melakukan pembinaan tentang arti pentingnya lingkungan sehat yang dilakukan di pasar-pasar tradisional didampingi dinas pengampu urusan pasar
5. Jumlah ekspor produk ke LN terjadi peningkatan cukup tajam berasal dari adanya CV Sinar Joyoboyo yang tergabung dalam Lidah Buaya Group yang berlokasi di Kota Magelang, pabrik ini berkonsentrasi memproduksi sabun cuci dan aneka plastik dengan permintaan ekspor ke luar negeri.
6. Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah meningkat disebabkan semakin diminatinya produk-produk hasil UKM kota magelang yang dipamerkan dalam pameran-pameran di luar daerah seperti pameran INACRAF di Jakarta, TEI (Trade Expo Indonesia) di Jakarta, Jateng Fair di Semarang, Pameran APEKSI, Dekranasda di Semarang, UKM Jateng Expo dan pameran-pameran lain yang secara mandiri diikuti oleh pelaku usaha UMKM.

- Jumlah alat UTTP yang ditera melampaui target yang ditetapkan ini terjadi dikarenakan obyek tera tidak hanya barang-barang yang wajib tera di dalam Kota Magelang tetapi juga dari daerah luar Kota Magelang boleh melakukan tera pada UPT Metrologi Kota Magelang, sehingga barang yang ditera melebihi target yang ditetapkan.

Indikator mempunyai nilai capaian sangat rendah adalah Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar, hal ini tidak lepas dari beberapa faktor penyebab antara lain:

- Tingkat kriminalitas ini diukur dari kejadian kriminal dipasar tahun n-1 dibandingkan dengan kejadian kriminal tahun n
- Tahun 2018 secara keseluruhan hanya terjadi 1 (satu) aduan kejadian kriminal sedangkan tahun 2019 tercatat 13 aduan kejadian kriminal
- Walaupun terjadi lonjakan kejadian kriminal namun jika dilihat dari total jumlah kejadian yang hanya 13 kejadian kriminal dalam 1 tahun, masih tergolong terkendali.

Sedangkan untuk indicator persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal belum tercapai karena dari 5 pasar yang dikelola Pemerintah Kota Magelang, baru 2 pasar yang memenuhi universal design yaitu Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban, sedangkan Pasar Gotong Royong, Pasar Kebonpolo dan Pasar Sidomukti belum memenuhi.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dari 10 indikator, 8 indikator diperkirakan akan tercapai pada akhir periode RPJMD, 1 indikator perlu upaya yaitu persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design, dan 1 indikator perlu upaya keras dan inovatif yaitu persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah:

- Pemenuhan sarana prasarana perdagangan yang memenuhi standar universal design
- Meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasar dan sarana perdagangan

3.6 Perindustrian

Realisasi yang telah dicapai pada penyelenggaraan urusan perindustrian secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2019	capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,3%	3,20%	135,12%	4.222,5%	ST	4.094,5%	ST	Disperindag
2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	15	12	13	108%	ST	86,67%	T	Disperindag
3	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)	4,30%	4,20%	6,49%	155%	ST	150,93%	ST	Disperindag
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,29%	5,14%	5,19%	109,7%	ST	98,11%	ST	Disperindag

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

Dari 4 (empat) program prioritas yang di dalamnya memuat 4 (empat) indikator kinerja urusan perindustrian seluruh indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan. Faktor pendorong tercapainya target tersebut sebagai berikut:

- Fasilitasi Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatnya daya saing IKM Formal melalui Gugus Kendali Mutu, HAACP, GMP, ISO, SNI yang sangat membantu para pelaku industri dalam upaya peningkatan penerapan system kendali mutu tersebut.
- Mempermudah proses perijinan
- Koordinasi intensif dengan pelaku usaha

Dihadapkan dengan target akhir periode RPJMD, keempat indikator urusan perindustrian diperkirakan akan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan perindustrian terutama pada tahun 2021 adalah:

- Meningkatkan daya saing IKM
- Meningkatkan kemudahan dan integrasi perijinan perindustrian

3. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dalam tertib pendataan

3.7 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi dilaksanakan melalui beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2019

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				OPD
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	100%	33,33%	33,33%	SR	33,33%	SR	Disnaker
2	Program Transmigrasi Regional	Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Disnaker

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2020

Dari 2 (dua) indikator urusan transmigrasi, kinerjanya kontradiktif, 1 (satu) indikator kinerjanya Sangat Tinggi (ST) sedangkan 1 (satu) indikator lainnya sangat rendah (SR). Indikator yang kinerjanya Sangat Tinggi adalah Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi dengan capaian 100%. Tingginya capaian indikator ini sangat terbantu dengan adanya dukungan dari OPD kecamatan dan kelurahan yang mampu menghadirkan peserta masyarakat di 17 kelurahan untuk mengikuti sosialisasi tentang transmigrasi.

Sedangkan indikator yang kinerjanya Sangat Rendah adalah persentase calon transmigrasi yang ditempatkan. Capaian kinerja indikator ini sangat tergantung dari besarnya kuota transmigrasi untuk wilayah Kota Magelang dan kesiapan lahan penempatan transmigrasi. Hal tersebut baru dapat dilaksanakan setelah lokasi penempatan dinyatakan *clean and clear* (2 C). Terkait penempatan peserta transmigrasi, dari kuota yang ada sebanyak 3 peserta yang benar-benar berminat dan terpilih, namun pada saat akhir yaitu penempatan terdapat 2 peserta yang mengundurkan diri disebabkan tidak direstui orang tuanya dan karena belum jelasnya kondisi lahan di area transmigrasi. Sehingga capaian indikator ini sangat rendah. Kendala yang dihadapi antara lain kesiapan lahan area transmigrasi, dan permasalahan internal masyarakat sendiri seperti tidak direstui orang tuanya.

Dari kedua indikator transmigrasi, 1 indikator diperkirakan akan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD, sedangkan 1 indikator perlu upaya keras untuk mewujudkannya yaitu persentase calon transmigrasi yang ditempatkan.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan transmigrasi terutama pada tahun 2021 adalah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan calon transmigrasi dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lokasi penempatan transmigrasi.

4 URUSAN PENUNJANG

4.1 Fungsi Lain-lain

Fungsi penunjang lain lain melibatkan 27 indikator dan 9 program. Capaian indikator Fungsi ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi Lain Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd target 2019		Thd target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bag Prokompim
		Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	78%	66%	100%	151,52%	ST	128,2%	ST	DPMPSTP
2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	DPMPSTP
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	100%	80%	100%	125%	ST	100%	ST	DPMPSTP
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100 %	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bag Tapem

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd target 2019		Thd target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah review PERDA/PERWAL	3	1	4	400%	ST	133,33%	ST	Bag Hukum
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	3	1	3	300%	ST	100%	ST	DPMPTSP
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1	0	0	0%	-	100%	ST	Bag Kesra
5	Program pengelolaan barang milik daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	80%	70%	76,18%	108,83%	ST	95,22%	ST	BPKAD
		Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	BPKAD
		Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	BPKAD
		Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	BPKAD
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bag Umum
7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Setwan
8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bag Tapem
9	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	40%	63,69%	159,23%	ST	115,8%	ST	Inspektorat
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	100%	85%	100%	117,65%	ST	100%	ST	Inspektorat
		Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	30%	10,34%	34,47%	SR	20,68%	SR	Bag Organisasi
		Nilai hasil LKJip SKPD	B	BB	B	100%	ST	100%	ST	Bag Organisasi
		Persentase SKPD yang direview LKJIP	75%	55%	75,86%	137,93%	ST	101,15%	ST	Bag Organisasi
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	96%	93,07%	96,95%	ST	97,96%	ST	Inspektorat
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	5%	40%	19,23%	48,01%	SR	384,6%	ST	Inspektorat
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	100%	95,45%	95,45%	ST	95,45%	ST	Inspektorat
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	100%	92,80%	92,80%	ST	92,80%	ST	Inspektorat
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	75%	83,44%	111,25%	ST	98,16%	ST	Bag Tapem
persentase SPM yang mencapai target nasional	85%	75%	80%	106,57%	ST	94,12%	ST	Bag Tapem		
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bag Organisasi

Dari 9 program dan 27 indikator dalam fungsi lain lain hampir semua indikator menunjukkan hasil positif. Sebanyak 24 indikator telah mencapai target dengan capaian sangat tinggi, dan 2 (dua) indikator dengan capaian sangat rendah dan perlu upaya keras untuk mencapai target yaitu indikator persentase zona integritas yang terbentuk dan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun. Pembentukan zona integritas mengalami kendala kompleksitas permasalahan dan luasnya ruang lingkup perubahan sehingga membutuhkan banyak tahapan. SIPID di Kota Magelang hingga tahun 2019 sebagai sistem informasi yang menyajikan data peluang investasi masih belum optimal. Informasi yang dibuat dalam SIPID baru mencapai 70% dari total kriteria yang disajikan.

4.2 Keuangan

Kinerja pembangunan daerah Kota Magelang diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2019, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2015-2020. Kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan pada fungsi penunjang pemerintahan keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 9 indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program pada Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	70%	76,18%	108,82%	ST	95,23%	ST	BPKAD
		Barang Milik Daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	ST	100,00%	ST	BPKAD
		Pelaporan Semesteran Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	ST	100,00%	ST	BPKAD

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
		Pelaporan Tahunan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	ST	100.00%	ST	BPKAD
2.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	10.21%	12.83%	9.47%	73.79%	S	92.75%	ST	BPKAD
		Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90%	87%	100%	114.94%	ST	111.11%	ST	BPKAD
3	Program Peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	12%	12.33%	14.78%	119.88%	ST	123.17%	ST	BPKAD
		Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	2.91%	3.33%	3.33%	99.89%	ST	114.43%	ST	BPKAD
4	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusda	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2.59%	2.54%	3.33%	130.96%	ST	128.57%	ST	BPKAD

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2019

Dari kesembilan indikator kinerja pada Fungsi Penunjang Pemerintah Keuangan capaiannya sangat baik. Ada 8 (delapan) indikator kinerja yang capaiannya Sangat Tinggi (ST) dan 1 (satu) indikator yang capaiannya Tinggi (T).

Di antara indikator kinerja yang capaiannya Sangat Tinggi (ST), Indikator kinerja Fungsi Penunjang Pemerintah Keuangan yang tertinggi adalah Capaian Rasio Bagi Hasil Laba BUMD terhadap PAD, yakni 130,96%. Secara keseluruhan, laba yang diperoleh BUMD mencapai target bahkan ada beberapa BUMD yang melebihi target. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Perkembangan Modal Disetor dan Bagian Laba BUMD

NO	KETERANGAN	JUMLAH MODAL DISETOR S/D TH 2018	BAGIAN LABA (PAD)				%	RENT MODAL TH 2019	
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	BAGIAN LABA TH 2018 (PAD TH 2019)			
						RENCANA			REALISASI
1	PDAM	18,375,703,508	741,589,750	1,172,684,700	1,805,182,000	1,789,589,450	1,954,707,000	109.23	10.64
2	PDOW TKL	10,919,620,549	1,262,731,250	1,408,272,250	1,385,255,000	1,541,036,200	1,528,439,000	99.18	14.00
3	PD PERCETAKAN	3,664,316,625	-	-	21,725,000	65,799,000	-	-	-
4	PD PERBENGKELAN	1,650,000,000	24,864,400	43,662,300	57,242,000	99,228,000	83,953,000	84.61	5.09
5	PD BPR BANK MGL	24,338,218,000	1,642,152,600	1,774,402,300	2,005,786,000	2,258,496,000	1,779,845,000	78.81	7.31
6	PD BPR BKK KOTA MGL	3,160,000,000	49,187,850	135,221,742	171,208,000	184,692,000	187,600,000	101.57	5.94
	JUMLAH	62.107.858.682	3.720.525.850	4.534.243.292	5.446.398.000	5.938.840.650	5.534.544.000	1.62	8.91

Sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kota Magelang

Dibandingkan dengan realisasi Rasio Bagi Hasil Laba BUMD terhadap PAD pada tahun 2018, maka pada tahun 2019 terjadi penurunan yakni dari 3.85% (tahun 2018) menjadi 3.33% (tahun 2019). Hal ini terjadi karena target Laba PDOW Taman Kyai Langgeng, PD Perbengkelan, PD BPR Bank Magelang tidak mencapai target. Bahkan untuk PD Percetakan sama sekali tidak mencapai target.

Selain indikator kinerja dengan capaian Sangat Tinggi, terdapat juga 1 (satu) indikator kinerja yang memiliki capaian Sedang (S) yaitu Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 sebesar 73.79%. Capaian indikator ini yang terkategori Sedang (S). Namun apabila kita melihat pada nilai perolehan PAD, maka sebenarnya realisasi PAD telah mencapai target. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Potensi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kinerja Realisasi PAD terhadap Potensi PAD	Kinerja Realisasi PAD terhadap Target PAD	Tingkat Pertumbuhan PAD
2015	207.682.651.625,-	152.806.995.000,-	186.677.410.081,-	89.89%	122.17%	122.17%
2016	269.616.256.588,-	197.465.478.000,-	220.217.864.000,-	81.68%	111.52%	111.52%
2017	297.261.794.010,-	218.085.185.000,-	233.392.755.573,-	78.51%	107.02%	107.02%
2018	297.261.794.010,-	225.916.332.000,-	249.873.268.826,-	84.06%	110.60%	110.60%

Tahun	Potensi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kinerja Realisasi PAD terhadap Potensi PAD	Kinerja Realisasi PAD terhadap Target PAD	Tingkat Pertumbuhan PAD
2019	240.276.687.120,-	242.404.296.000,-	273.534.038.858,-	113,84%	112,84%	112,84%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Magelang TA. 2010-2019, BPKAD Kota Magelang

Potensi PAD menunjukkan trend yang positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 potensi PAD diprediksikan turun karena adanya penjenjangan fasilitas kesehatan yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan RSUD Tidar Magelang. Adapun prosentase realisasi PAD terhadap Potensi PAD cukup berfluktuatif. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kota Magelang, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang dapat memenuhi target pada Tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan dalam APBD Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2019 sebesar Rp. 242.404.296.000,00 tercapai sebesar Rp. 273.534.038.858,00 atau sebesar 112,84%. Iklim Investasi yang terus dibangun oleh Pemerintah Kota Magelang diharapkan ke depan akan berdampak pada kenaikan PAD Kota Magelang sehingga mengurangi ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Tabel di bawah ini menyajikan kenaikan/penurunan PAD Kota Magelang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berikut:

Tabel 4.5
Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2015-2019

No	URAIAN	REALISASI PAD	% Kenaikan/ Penurunan PAD
1	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015	186.667.410.081, -	13.20%
2	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016	204.220.414.045, -	9.40%
3	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	233.392.755.573 -	14.28%
4	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018	249.873.268.826,00	7.06%
5	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019	273.534.038.858,00	9.47%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2015- 2019 (data diolah)

Adapun Kendala yang dihadapi adalah:

1. Masih ada kesenjangan antara potensi wajib pajak pada objek pajak tertentu dengan wajib pajak yang patuh membayar pajak. Kondisi ini menyebabkan deviasi atas penerimaan pajak. Salah satu contoh, pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 masih terdapat 23.24% wajib pajak yang memiliki objek pajak yang belum patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2019

NO	TAHUN	POTENSI		REALISASI		DEVIASI		CAPAIAN	
		JUMLAH OP	NILAI	JUMLAH OP	NILAI	JUMLAH OP	NILAI	JUMLAH OP	NILAI
1	2017	36.325	6.425.009.761	27.723	6.257.673.488	8.512	167.336.273	76.32%	97.40%
2	2018	36.622	6.510.120.494	28.314	6.361.870.161	8.308	148.250.333	77.31%	97.72%
3	2019	36.445	7024.484.179	27.976	6.686.654.782	8.469	337.829.397	76.76%	95.19%

Sumber : BPKAD Kota Magelang, 2019

2. Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (*ability to pay* rendah).
3. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan potensi pajak, sehingga sering ditemukan adanya tindakan ilegal yang dapat mengurangi pemasukan PAD.

Kesembilan indikator Fungsi Penunjang Pemerintah Keuangan memiliki capaian indikator Sangat Tinggi (ST) terhadap target RPJMD. Ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang sudah melampaui target RPJMD dan ada 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target RPJMD yaitu Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang dan prosentase pertumbuhan PAD. Untuk prosentase pertumbuhan PAD memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMD dikarenakan kondisi perekonomian secara umum yang masih mengalami kelesuan akibat pandemic virus Covid-19. Namun target kedua indikator tersebut diperkirakan dapat tercapai di akhir periode RPJMD.

Adapun Solusi yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Magelang di antaranya:

1. Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak.
2. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta melakukan monitoring baik dengan menggunakan TMD (*Tax Monitoring Device*) seperti penggunaan *Tapping Box* pada mesin kasir maupun peninjauan secara langsung agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti OPD terkait untuk memantau potensi pajak serta bekerjasama dengan pihak terkait seperti Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak secara online serta melakukan inovasi-inovasi sehingga wajib pajak merasa nyaman dan dimudahkan dalam membayar pajak.
5. Melakukan pengamanan terhadap asset daerah sehingga asset daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.

4.3 Perencanaan Pembangunan

Kinerja fungsi penunjang urusan perencanaan pada tahun 2019 menunjukkan kondisi positif, karena seluruh indikator tercapai sesuai target, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bappeda
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	80%	84,55%	105,69%	ST	93,94%	ST	Bappeda
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	80%	88,71%	110,88%	ST	104,36%	ST	Bappeda
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	45%	45,24%	100,53%	ST	82,25%	T	Bappeda
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	78%	81,48%	101,85%	ST	95,86%	ST	Bappeda
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bappeda
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bappeda
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bappeda
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	4	4	100%	ST	100%	ST	Bappeda
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95%	90%	100%	111,11%	ST	105,26%	ST	Bappeda
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	Bappeda

Dari sebelas indikator kinerja urusan perencanaan, semuanya tercapai sesuai target tahun 2019. Capaian tersebut juga sinkron dengan capaian kinerja indikator terhadap target RPJMD tahun 2021, sepuluh diantaranya tercapai sangat tinggi dan satu indikator tercapai dengan status tinggi. Melihat kondisi ini maka pada akhir tahun periode RPJMD diperkirakan target indikator kinerja pada urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai.

4.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dilaksanakan dengan 6 (enam) program dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th. 2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi	59%	57,50%	55,63 %	96,75%	ST	94,23%	ST	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan BKD	100%	100%	96,44%	96,44%	ST	96,44%	ST	BKPP
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	46%	46%	54,55%	118,58%	ST	118,58%	ST	BKPP
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	100%	60%	60%	R	60%	R	BKPP
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	5%	62,50%	1250%	ST	1250%	ST	BKPP
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,01%	0,08%	0,07%	113,34%	ST	-5	SR	BKPP
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	98%	97,50%	98,25%	100,77%	ST	100,25%	ST	BKPP
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,18%	0,20%	0,28%	61,35%	R	44,44%	SR	BKPP
3.	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	98%	96%	83%	86,46%	T	84,46%	T	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	100%	97,37%	97,37%	ST	97,37%	ST	BKPP
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	90%	90%	125%	138,89%	ST	138,89%	ST	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Karakter	97%	97%	68,93%	71,06%	S	71,06%	S	BKPP
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang menerapkan finger print	100%	95%	93,79%	98,73%	ST	93,79%	ST	BKPP
6.	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	92%	92%	95,49%	103,79%	ST	103,79%	ST	BKPP

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2020

Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2019 tidak seluruhnya dapat mencapai target. Dari 15 indikator yang mendukung 6 program, terdapat 12 indikator yang sudah tercapai/melampaui, 1 (satu) sedang, dan 2 (dua) indikator masih rendah. Indikator yang kinerjanya jauh melampaui target yaitu presentase penanganan pelanggaran disiplin ASN dengan capaian 1250%. Faktor pendorong dari capaian indikator ini jumlah seluruh pelanggaran yang ada adalah pelanggaran disiplin sedang/berat yang kesemuanya telah ditangani oleh OPD yang membidangi kepegawaian.

Di sisi lain, masih terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya masih berada di bawah persyaratan minimal pencapaian kerja yang diharapkan yaitu:

1. Presentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural. Faktor yang dihadapi dalam pencapaian target dikarenakan proses seleksi memerlukan waktu yang lama karena prosedurnya melibatkan persetujuan dari beberapa instansi pusat secara berjenjang (dari KASN, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri), sehingga dengan lamanya proses seleksi kurang dapat mengakomodir adanya kekosongan JPT karena alasan pensiun, perpindahan jabatan ke fungsional, ataupun mutasi.
2. Presentase pelanggaran disiplin ASN. Rendahnya pencapaian indikator ini dikarenakan jumlah pembagi pada indikatornya yaitu jumlah ASN, terjadi perubahan. Awal RPJM tahun 2016 jumlah ASN Kota Magelang hampir empat ribu orang. Pada tahun 2017 Guru SMA, SMK dan beberapa fungsional menjadi kewenangan provinsi, jumlah ASN di Kota Magelang menjadi 2.800an, sehingga berpengaruh pada presentase yang menjadi besar (slope negatif) dan membuat target tidak tercapai.

Sedangkan hasil evaluasi kinerja terhadap RPJMD terdapat 11 indikator yang capaiannya tinggi dan sangat tinggi dan diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD dan 4 indikator yang mungkin tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator dimaksud dikarenakan berkurangnya jumlah ASN dan optimisnya target pencapaian RPJMD.

4.5 Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan melibatkan 9 (sembilan) program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan target dan realisasi capaian tahun 2019 nampak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d.2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Th.2019				PD Penanggung Jawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1.	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	23%	17%	36.22%	213.06%	ST	157.48%	ST	Balitbang
		Persentase krenova OPD yang berkualitas	12%	8%	12.86%	160.71%	ST	107.17%	ST	Balitbang
2	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase hasil riset/kajian yang ditindaklanjuti	50%	40%	42.31%	105.77%	ST	84,62%	T	Balitbang
3	Program Pengembangan dan Penerapan Ipte9	Cakupan Pengembangan IPTEK	20%	15%	15.16%	101.05%	ST	75.8%	T	Balitbang
4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	20%	15%	48.15%	321.03%	ST	240.75%	ST	Balitbang
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Cakupan publikasi hasil hasil penelitian	80%	70%	73.33%	104.76%	ST	91.66%	ST	Balitbang
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	Cakupan pembinaan hilirisasi produk teknologi dan Inovasi	15%	7%	10.00%	142.86%	ST	66,66%	S	Balitbang
7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan INovasi	Persentase produk teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	12%	21.74%	181.16%	ST	144.93%	ST	Balitbang
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	Cakupan Penguatan SIDA	75%	55%	56.67%	103.03%	ST	75.56%	T	Balitbang
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jaringan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan peningkatan kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	55%	61.65%	112.10%	ST	82.2%	T	Balitbang

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, 2020

Kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan di Kota Magelang sudah positif. Data hasil capaian urusan di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja telah mencapai bahkan melebihi target tahun 2019. Yang menjadi faktor pendorong beberapa indikator, adalah tingginya minat masyarakat dalam melakukan inovasi kreatif, dan mengirimkannya untuk mengikuti kontes yang dilaksanakan oleh Balitbang. Balitbang juga secara rutin melaksanakan kegiatan Apresiasi Budaya IPTEK, untuk menumbuhkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap IPTEK sejak dini. Acara ini mengenalkan IPTEK kepada anak-anak usia SD/SMP dalam bentuk lomba Raket Air dan/atau Lomba Robotik.

Tingginya pencapaian hasil riset juga dikarenakan Pemerintah Kota Magelang meminta kepada para perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang untuk mewajibkan mahasiswanya menyerahkan hasil tulisan ilmiahnya (Skripsi/ Thesis/ Disertasi) kepada Balitbang. Kewajiban ini juga dikenakan kepada peneliti/mahasiswa dari perguruan tinggi di luar Kota Magelang yang mengadakan riset dengan lokus Kota Magelang.

Dilihat dari capaian terhadap target RPJM, urusan penelitian dan pengembangan juga menunjukkan capaian yang tinggi dan sangat tinggi di hampir semua indikator. Hanya 1 indikator yang masih memerlukan upaya untuk mencapai target yaitu cakupan pembinaan hilirisasi produk teknologi dan Inovasi. Walau begitu, dilihat dari trend pencapaian tiap tahun, indikator ini optimis untuk bisa tercapai di akhir masa RPJMD.

4.6 Pengawasan

Indikator kinerja urusan pengawasan melibatkan 15 (lima belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPD Tahun 2019				PD Penanggungjawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrak SKPD, satker dan BUMD plus targetnya)	87%	70%	100%	142,86%	ST	114,94%	ST	Inspektorat
		Persentase aparat SPIP aktif	80%	70%	75,86%	108,37%	ST	94,83%	ST	Inspektorat
		Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	90%	85%	100%	117,65%	ST	111,11%	ST	Inspektorat
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100,00%	ST	100,00%	ST	Inspektorat
		Persentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	80%	70%	95%	135,71%	ST	118,75%	ST	Inspektorat

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Target 2019	Capaian 2019	Kinerja RKPd Tahun 2019				PD Penanggungjawab
						Thd Target 2019		Thd Target RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	85%	75%	100%	133,33%	ST	117,65%	ST	Inspektorat
		Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan pencapaian indikator kinerja daerah	80%	70%	100%	142,86%	ST	125,00%	ST	Bappeda
		Perjanjian kinerja yang memenuhi kriteria standar	100%	80%	100%	125%	ST	100,00%	ST	Bagian Organisasi
		Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	90%	60%	75,86%	126,44%	ST	84,29%	T	Inspektorat
		Penurunan kasus temuan LKPD	0	1	1	100%	ST	0,00%	SR	Inspektorat
		Rasio laporan APBD, DAK, dan Bantuan Keuangan tepat waktu	100%	95%	97,70%	102,84%	ST	97,70%	ST	Bagian Administrasi Pembangunan
		Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD	95%	95%	80,82	85,07%	T	85,07%	T	Bagian Organisasi
4	Program Sinergitas Penerapan SPI pada PD	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	55%	70%	76,64%	109,49%	ST	139,35%	ST	Inspektorat
		Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	5%	40%	0,05%	199,87%	ST	199,00%	ST	Inspektorat
		Persentase implementasi SPIP	100%	84%	75,86%	90,31%	ST	75,86%	T	Inspektorat

Sumber: Inspektorat Kota Magelang, Bagian Organisasi Kota Magelang, Bagian Administrasi Pembangunan Kota, Bappeda Kota Magelang 2020

Dari 4 program dan 15 indikator dalam urusan pengawasan hampir semua indikator menunjukkan keberhasilannya mencapai target. Dari kelimabelas indikator kinerja urusan pengawasan, terdapat 14 (empat belas) indikator yang capaiannya sangat tinggi, dan 1 (satu) indikator tinggi.

Dalam penyelenggaraan urusan pengawasan, terdapat indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2019 \geq 150% target RPJMD), yaitu:

1. Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP, faktor pendorongnya adalah:
 - a. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015. Dalam jangka waktu 5 tahun kedepan Kapabilitas APIP dapat ditingkatkan menjadi level 3. Menyikapi hal tersebut Inspektorat Kota Magelang sejak tahun 2017 (kapabilitas APIP masih diposisi level 2 menuju level 3) yang semula Peran dan Layanan APIP adalah Audit Ketaatan (Khususnya terhadap organisasi, Aset dan SDM) bergeser paradigmanya setelah Inspektorat mencapai level 3 (Integrated) penuh pada Tahun 2019, dimana peran dan layanan APIP kearah layanan konsultasi dan Audit kinerja/program evaluasi sehingga dalam praktik pengawasan harus mendasar pada perencanaan audit berbasis Risiko, dimana masing masing entitas terperiksa harus membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang menggambarkan apa saja kegiatan yang mempunyai risiko tinggi. Dari hasil RTP tersebut maka pemeriksa Inspektorat Kota Magelang akan memilah kegiatan yang berisiko tinggi untuk dilakukan pengawasan. Mulai tahun 2019, penilaian yang dilakukan berbasis resiko. jadi anggaran yang lebih beresiko yang dikawal oleh Inspektorat. Sedangkan sebelumnya, penilaian berbasis pendekatan SPJ yang artinya semua anggaran diperiksa.
 - b. Pada Tahun 2019, telah dilakukan pengawasan regular terhadap 50 entitas. Dan diperoleh hasil temuan Ketidakpatuhan UU (temuan finansial sebesar) Rp227.233.508 dibagi total jumlah Anggaran pada 50 entitas sebesar Rp419.657.206.886 sehingga didapati capaian sebesar 0,054%
 - c. Capaian tersebut menggambarkan bahwa fungsi pembinaan dalam rangka layanan konsultasi (advisory) telah dilaksanakan dengan baik sehingga pembinaan terhadap pengelolaan anggaran pada ke 50 entitas yang diperiksa dapat dikaterogikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibuktikan dengan semakin menurunnya temuan finansial (ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan).

Tabel 4.11
Capaian Indikator Kinerja Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP Tahun 2018-2019

No	Variabel	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah temuan finansial	139.593.300	227.233.508
2	Jumlah anggaran belanja yg diperiksa	13.855.738.039	419.657.206.886
	Persentase	1,01%	0,05%

Tabel diatas menunjukkan bahwa prosentase temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP menurun dari 1,01% pada tahun 2018, menjadi 0,05% pada tahun 2019.

Dari kelima belas indikator urusan pengawasan, hasil evaluasi kinerja terhadap RPJMD terdapat 11 (sebelas) indikator yang capaiannya sangat tinggi, 3 (tiga) indikator capaiannya tinggi dan 1 (satu) indikator capaiannya sangat rendah. Hal ini berarti ada 14 (empat belas) indikator yang diperkirakan dapat tercapai apad akhir periode RPJMD. Sedangkan 1 (satu) indikator memerlukan inovasi dalam pencapaian yaitu penurunan kasus temuan LKPD.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah:

1. Sosialisasi ke OPD tentang penilaian berbasis resiko, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang beresiko sehingga penurunan temuan bisa tercapai
2. Sebelum pemeriksaan, diteliti terlebih dahulu. Lalu diadakan evaluasi langsung ke OPD.
3. Ada tindak lanjut setelah pemeriksaan.